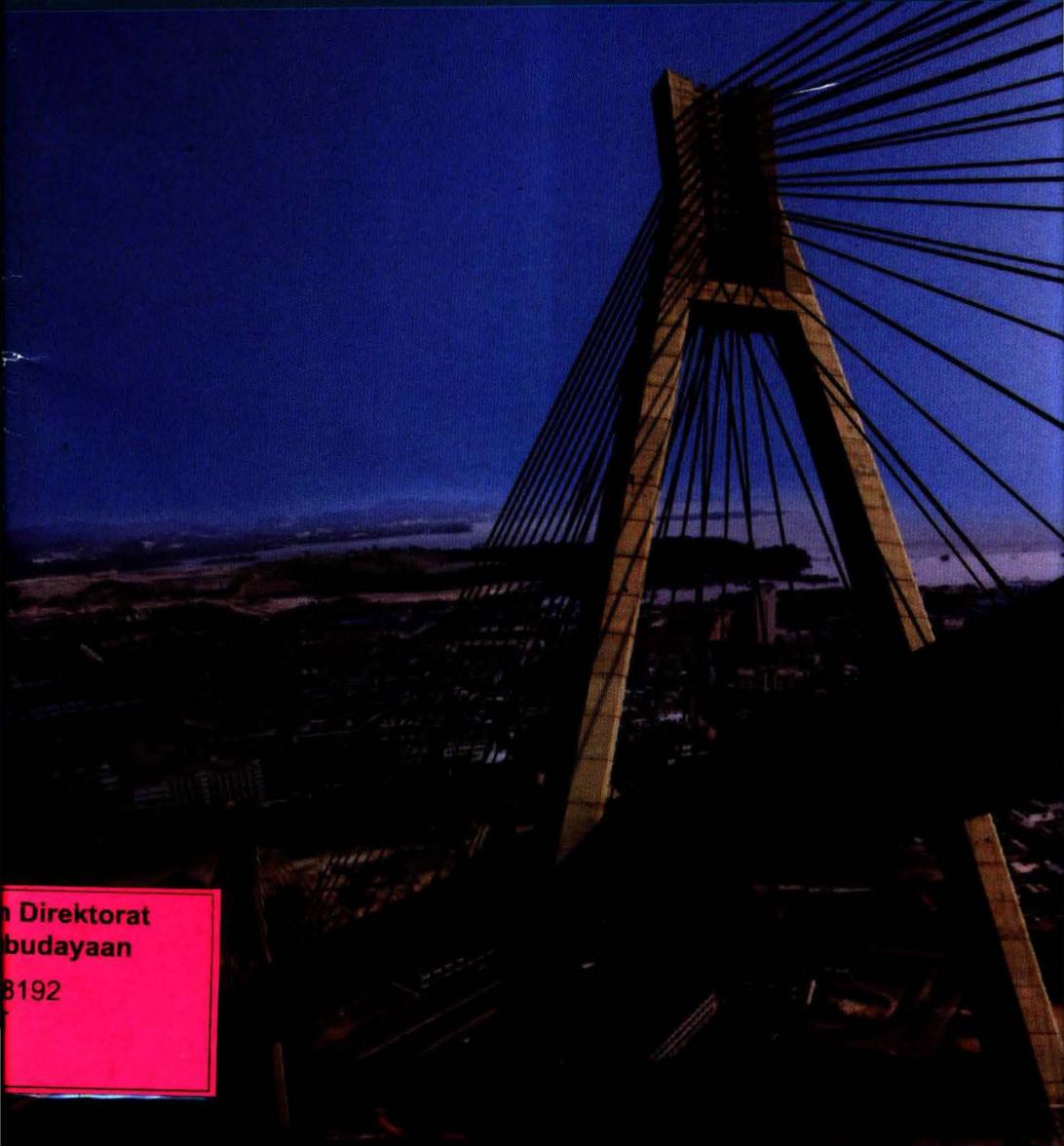


Ilia Rohana
Suarman

Kepulauan Riau: Metropolitan Baru di Perbatasan

Editor: Anastasia Wiyik S.



Direktorat
budayaan
8192



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
TANJUNGPINANG

307.74 932 51-2

**Sita Rohana
Suarman**

Kepulauan Riau : Metropolitan Baru Di Perbatasan

editor : Anastasia Wiwik S.

Diterbitkan oleh :
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang
2006

Kepulauan Riau : Metropolitan Baru di Perbatasan

Penulis

Siti Rohana
Suarman

Editor

Anastasia Wiwik S.

Desain Cover

Wildan Afianto

Tata Letak

Cacik Gunarti

Cetakan I, November 2006

Penerbit

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang

ISBN : 978-979-1281-09-6

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

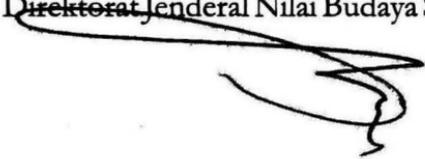
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Tanjungpinang adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Lembaga ini didirikan bukan berdasarkan wilayah administratif, melainkan daerah kebudayaan Melayu yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Fungsi lembaga ini adalah melaksanakan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional di wilayah kerjanya.

Kami menganggap penting bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh tenaga peneliti (fungsional) di setiap Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional selayaknya dipublikasikan kepada khalayak luas, agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi isi penelitian tersebut, di samping mendorong minat masyarakat untuk mengetahui dan memahami sejarah dan budaya nusantara yang amat beragam.

Terbitnya buku ini kami sambut dengan antusias sekali dan diharapkan untuk tahun-tahun mendatang penerbitan seperti ini akan lebih banyak dan beragam baik jenis maupun cakupan bahasannya.

Sehubungan dengan itu, kami menyambut baik terbitnya buku yang berjudul: **Kepulauan Riau : Metropolitan Baru di Perbatasan**. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2006
Direktur Tradisi
Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film


I. Gusti Nyoman Widja, SH
NIP. 130 606 820

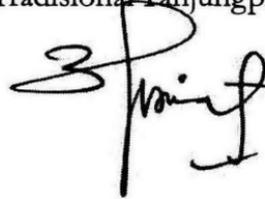
KATA PENGANTAR

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian sosial budaya dan inventarisasi untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan kebudayaan dalam pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang pada tahun anggaran 2006 menerbitkan 10 (sepuluh) judul buku dari penelitian yang telah dilakukan para peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2000-2005, yang meliputi aspek kesejarahan maupun kebudayaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peneliti yang telah bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi dalam melakukan penelitian ini, juga kepada divisi penerbitan yang mengupayakan penerbitan ini terwujud.

Dengan terbitnya buku ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, semoga berguna bagi Bangsa dan Negara yang kita cintai.

Kepala
Balai Kajian Sejarah dan Nilai
Tradisional Tanjungpinang



Dra. Nismawati Tarigan
NIP.131 913 840

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Tradisi Ditjen NBSF	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I Pendahuluan

1.1 Wilayah Sempadan	1
1.2 Permasalahan	3
1.2 Lingkup Kajian	4

BAB II Negeri Segantang Lada

2.1 Lintas Sejarah Kepulauan Riau	9
2.2 Kerjasama Sijori: Merekatkan Ikatan Lama	12
2.3 Magnet Baru Para Pendatang	14

BAB III Batam Dan Tanjung Pinang

3.1 Batam: Dari Pulau Kelapa ke Rimba Beton	19
3.2 Tanjungpinang: Mengejar Keteringgalan	24

BAB IV Kepulauan Riau Ambang Abad ke-21

4.1 Lintas Manusia dan Barang	29
4.1.1 Basis Pengiriman Tenaga Kerja	29
4.1.2 Pasar Lokal Barang Impor	34
4.2 Metropolitan Baru di Perbatasan	38
4.2.1 Lahan Industri Multinasional	38
4.2.2 Pusat Konsumsi: Leisure dan Gaya Hidup	45

BAB V Dilema Lokal

5.1 <i>Ruli</i> : Masalah Kependudukan di Kota Batam	51
5.2 Lobam dan Lagoi: “Nyanyi Sunyi di Keramaian”	54
5.3 Menjual Tanah, Menuai Bencana: dampak lingkungan akibat Industrialisasi (Batam) dan penambangan pasir (Bintan)	55

BAB VI Penutup

Daftar Pustaka	65
Biografi Penulis	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Wilayah Sempadan

Tiga puluh tahun lampau kawasan Kepulauan Riau merupakan kawasan sempadan yang jauh dari jangkauan negara. Kawasan ini kemudian menjadi lebih dekat dengan dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, dibandingkan dengan negara induknya, Indonesia. Pemerintah pusat baru melirik kawasan ini di era pemerintahan Orde Baru. Pemerintah melihat peluang ekonomi yang besar karena kedekatannya dengan Singapura dan jalur perdagangan internasional.

Pengembangan Batam, adalah satu pulau di Kepulauan Riau yang letaknya hanya 20 kilometer laut di sebelah selatan Singapura, di awal tahun 70-an merupakan langkah pertama realisasi untuk menangkap peluang ekonomi tersebut. Batam, mulai dikembangkan sebagai sebuah wilayah dengan tata ruang terencana dan memiliki pemerintahan sendiri.

Beberapa tahun kemudian, proyek pengembangan Batam pun menjadi perhatian Singapura. Lalu dirintislah sebuah kerjasama yang melibatkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang dikenal dengan nama Segitiga Pertumbuhan (*Growyh Triangle*) atau Kerjasama Sijori (Singapura, Johor, dan Riau-Indonesia). Kerjasama ini menjadi motor perkembangan kawasan kepulauan di bagian utara Indonesia ini pada masa kemudian.

Dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kepulauan Riau, telah mengalami perkembangan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan Indonesia. Perkembangan ini menjadikan kedua negara tersebut mulai meletakkan fokus perhatian pada arus manusia (baca: tenaga kerja) dan barang lintas-batas antara ketiga negara tersebut.

Arus barang dan orang yang melintas batas negara-negara bertetangga menjadi titik perhatian dalam banyak kajian mengenai masyarakat perbatasan. Pusat perhatian dalam kajian ini adalah arus lintas-batas barang ini dalam relasi ekonomi.

Dalam relasi ekonomi, bila hubungan antara dua pihak yang terlibat merupakan hubungan yang setara, maka pertukaran terjadi juga

berimbang. Dalam konteks arus lintas-batas, barang yang keluar dan masuk ke dan dari satu negara ke negara lainnya bersifat saling melengkapi. Sedangkan bila hubungan bersifat tidak seimbang, dimana ada salah satu pihak secara ekonomi dominan, dan dengan leluasa dapat menjalin relasi ekonomi dengan pihak lain juga, maka arus lintas barang pun berada dalam konteks yang tidak berimbang, meskipun sangat mungkin masih saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, bila dilihat dari relasi kekuasaannya, kedua pihak yang terlibat berhubungan dalam kerangka yang satu lebih berperan sebagai superior dan yang lainnya subordinat. Dengan kata lain, hubungan ini akan lebih banyak ditentukan oleh pihak superior yang memiliki posisi penawaran yang lebih kuat, bukan hanya karena menguasai kapital tetapi juga bisa memilih partner kerjasamanya dengan.

Dalam kasus Kepulauan Riau, jenis hubungan yang kedua ini tampaknya yang mewarnai hubungan dalam kerjasama dengan dengan dua negara tetangga. Kerjasama tiga negara bukanlah sebuah bangunan segitiga yang horisontal, tetapi vertikal, dimana Singapura sebagai pemegang kapital terkuat memainkan perannya dalam menentukan kebijakan dalam proyek kerjasama tersebut.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dari bentuk arus lintas-batas orang dan barang yang terjadi. Misalnya, dari kasus penyelundupan tenaga kerja dan barang, yang muncul karena adanya kesenjangan perkembangan ekonomi dengan negara tetangga. Banyak sekali tenaga kerja maupun barang yang diselundupkan dari wilayah Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjungpinang, dan Tanjungbalai-Karimun ke Malaysia dan Singapura. Penyelundupan terbuka yang biasanya membawa potongan-potongan besi untuk dijual ke Singapura dan kembali ke Indonesia dengan membawa barang-barang bekas untuk dijual di pasar barang bekas seperti furniture dan elektronik. Begitu juga penyelundupan tenaga kerja, biasa dilakukan pada malam hari, terutama untuk tujuan Malaysia sebagai pekerja di perkebunan-perkebunan atau konstruksi. Kasus-kasus ini secara jelas menunjukkan posisi subordinat Kepulauan Riau, sebagai bagian dari negara Indonesia, terhadap dua negara tetangga.

Hal lain yang juga menunjukkan posisi subordinat kawasan kepulauan di bagian utara Indonesia ini adalah skenario Segitiga

Pertumbuhan yang menjadikan beberapa pulau utama seperti Batam dan Bintan sebagai lokasi industri multinasional yang pada mulanya berada di Singapura, sementara kantor-kantor pusat operasionalnya tetap di pertahankan di sana. Pemindahan lokasi industri ini merupakan upaya 'pembersihan' dan penataan ulang Singapura untuk menjadi pusat ekonomi dunia, pusat operasional bagi perusahaan multinasional. Selain itu, kenyataan bahwa kawasan perbatasan telah menjadi lokasi wisata seks juga menunjukkan bahwa Segitiga Pertumbuhan lebih merupakan skenario Singapura untuk melakukan 'pembersihan' dengan menjadikan Kepulauan Riau sebagai 'tempat pembuangan sampah,' tidak hanya untuk industri berat dan menengah, tetapi juga 'sampah' lainnya, seperti prostitusi.

Memang tidak dipungkiri, interaksi dengan negara tetangga, terutama Singapura, telah membawa perubahan yang sangat besar bagi kawasan yang memiliki ratusan pulau ini. Salah satunya, berkembangnya beberapa kota di pulau utama seperti Batam, Bintan, dan Karimun menjadi metropolitan yang ditandai dengan perkembangan fisik kota yang sangat pesat. Bagi negara, kerjasama tiga negara ini telah menyumbangkan pendapatan yang cukup besar. Namun, tidak dapat diingkari bahwa perkembangan ini juga memunculkan dampak di tingkat lokal yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi masyarakat setempat.

Kajian ini merupakan sebuah rekaman untuk melihat dan mengkaji ulang kebijakan pemerintah pusat, atau negara, di tingkat lokal, dalam kaitannya dengan kerjasama dengan negara lain atau dengan dunia global. Terutama mengenai bagaimana interaksi lokal, nasional, dan global ini berjalan. Dengan fokus pada setting lokal, kajian ini merupakan usaha untuk mencoba menjawab bagaimana interaksi dengan dunia global dipahami di tingkat lokal, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

1.2 Permasalahan

Beberapa tahun terakhir ini, kawasan perbatasan seperti halnya Kepulauan Riau banyak menarik perhatian para ilmuwan sosial. Kawasan perbatasan menjadi ladang yang menarik untuk kajian kontak budaya, terutama pada tahun 80-an ketika globalisasi menerobos hampir

semua perintang ruang. Perekonomian global dalam wujud korporasi multinasional menyerbu wilayah-wilayah yang semua dianggap pinggirannya seperti kawasan Asia dan Afrika. Kontak-kontak budaya pun menjadi hal yang tak terelakkan dengan kemajuan transportasi dan informasi nirkabel.

Isu globalisasi ini pun mengemuka terkait dengan isu lokal seperti pudarnya identitas dan nilai-nilai budaya karena masuknya pengaruh global. Globalisasi telah mendorong masuknya pengaruh pasar dan hasil produksi kapitalis Barat yang menerobos batas-batas negara dianggap. Dalam kajian antropologi klasik, terjadinya erosi kebudayaan asli atau pudarnya kebudayaan asli menjadi puing-puing konsumsi yang homogen ini terjadi ketika masyarakat lokal memasuki ekonomi global (Miller, 1985, 1987; Firat, 1995).

Latar belakang inilah yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kota-kota di Kepulauan Riau ini berproses sebagai sebuah kota modern dimana di dalamnya berpadu berbagai kekuatan dan kepentingan baik yang bersifat lokal, global, maupun nasional. Pusat perhatian dalam penelitian ini adalah pada kehidupan ekonomi dan sosial budaya setempat dengan masuknya berbagai pengaruh luar baik dalam interaksinya dengan pendatang maupun korporasi asing.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai perkembangan kawasan Kepulauan Riau dengan adanya Kerjasama Sijori, sebagai wujud kerjasama ekonomi di tingkat global, serta dampak yang ditimbulkannya, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial budaya, dan barangkali juga politis. Dalam hal ini dampak yang dilihat terutama yang terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

1.3 Lingkup Kajian

Penelitian ini difokuskan pada interaksi sosial masyarakat antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok dalam kerangka interaksi global. Kelompok dalam hal ini bisa bermakna lembaga, baik lembaga pemerintah atau korporasi asing maupun dalam negeri. Lokasi penelitian secara umum adalah kawasan Kepulauan Riau, namun secara khusus hanya difokuskan pada dua pulau utama yaitu

Batam dan Bintan. Untuk kawasan Bintan, kajian ini tidak hanya memusatkan pada kota utamanya Tanjungpinang tetapi juga dua tempat lain yaitu Lobam dan Lagoi yang menjadi lokasi kerjasama multinasional. Meskipun kedua tempat terakhir tersebut secara administratif berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yang secara administratif terpisah dari pemerintahan Kota Tanjungpinang, namun keduanya dianggap memiliki kaitan erat dengan perkembangan Tanjungpinang secara umum.

Kajian ini ditujukan sebagai sebuah etnografi yang berbasis pada penelitian lapangan. Langkah pertama yang dilakukan di lapangan adalah melakukan observasi. Langkah ini penting untuk menangkap realita empiris yang terkait dengan topik penelitian. Hasil observasi akan menjadi awal untuk memperoleh gambaran fisik daerah penelitian juga menjadi bahan masukan dalam daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai perangkat untuk menjangkau data dan informasi di lapangan.

Observasi dilakukan di beberapa tempat yaitu, Batam, Tanjungpinang, Lagoi, dan Lobam. Keempat tempat ini dianggap mewakili kawasan yang berkembang dengan adanya Kerjasama Sijori. Selain itu, keempat tempat ini memiliki karakteristik yang saling berbeda, seperti Batam mewakili kota industri dan pusat kegiatan ekonomi yang terpadu, Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan, Lagoi sebagai pusat resor bertaraf internasional, dan Lobam sebagai sentra industri menengah.

Bersamaan dengan observasi, juga dilakukan kajian pustaka dalam rangka mencari informasi untuk penajaman topik dan untuk pengayaan data yang diperlukan sebelum penelitian lapangan dijalankan. Setelah terkumpul data dan informasi yang diperlukan, disusunlah kerangka pokok untuk dipakai sebagai pedoman lapangan yang dalam operasionalnya diwujudkan dalam bentuk daftar pertanyaan yang merangkum seluruh pertanyaan mengenai topik penelitian. Kajian pustaka ini tidak hanya diperlukan pada tahap awal penelitian saja, untuk mencari landasan teoritis, tetapi juga untuk sumber data dan informasi dalam tahap lanjut pada saat penulisan laporan. Dalam kajian pustaka, berbagai sumber data sekunder yang dianggap penting juga dikumpulkan dari berbagai sumber dari laporan-laporan, artikel, data kependudukan, clipping koran, dan berbagai informasi tertulis lainnya.

Setelah daftar pertanyaan dianggap matang, penelitian lapangan pun dilakukan. Sebagai sebuah etnografi, data lapangan yang paling utama adalah wawancara mendalam yang menempatkan penulis sebagai tidak hanya peneliti yang berdiri di luar lingkup subjek tetapi juga terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek. Keterlibatan ini tidak hanya dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan tetapi juga untuk menangkap konteks dan kesan guna lebih memperkaya data. Selain itu, penulis juga “membuka diri” terhadap data-data yang muncul tidak disengaja yang diperoleh dalam perbincangan sambil-lalu.

Pembiayaan dalam penelitian ini diambil dari anggaran pembangunan tahun 2004 Kantor Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang. Sedangkan keseluruhan tahapan penelitian dan penulisan laporan memakan waktu 6 bulan, yang dimulai pada bulan Mei 2004 sampai dengan Oktober 2004. Tahapannya sebagai berikut: bulan Mei merupakan tahap persiapan proposal, studi pustaka, dan penyusunan daftar pertanyaan. Bulan Juni, mulai turun ke lapangan untuk observasi dan pengumpulan data sekunder. Bulan Juli, wawancara pada informan dijalankan dengan daftar pertanyaan yang telah disempurnakan berdasarkan hasil observasi. Bulan Juli, mulai dilakukan klasifikasi data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Bulan Agustus hingga September merupakan tahap penulisan dan penyempurnaan laporan. Bulan Oktober, proses terakhir yaitu penggandaan laporan.

Secara garis besar, informan yang dilibatkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kelompok, yaitu 1) kelompok informan yang dapat memberikan data mengenai daerah penelitian dan konteks historisnya. Kelompok ini terdiri atas orang-orang yang cukup paham mengenai perkembangan kota, tokoh-tokoh masyarakat atau aparat pemerintah yang dianggap reliable; 2) kelompok informan yang dapat memberikan data spesifik mengenai beberapa aspek khusus seperti interaksi global-lokal dalam ekonomi, sosial budaya, dan politik; 3) kelompok informan yang menjadi pelaku atau terlibat dalam aspek-aspek yang dibahas dalam kajian ini. Mereka ini menjadi subjek wawancara mendalam untuk mendapatkan kisah hidupnya (life history) dalam setting penelitian ini. Kasus-kasus yang muncul dalam hasil wawancara ini akan diangkat sebagai punctuation untuk memberi penegasan pada deskripsi suatu masalah yang diangkat.

Kajian ini akan disajikan dalam kerangka sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan dan tujuan, ruang lingkup, metode penelitian, dan kerangka dasar. Bagian ini merupakan sebuah pengantar teoritis dan operasional mengenai jalannya penelitian.

Bab II Gambaran umum daerah penelitian berisi sejarah kawasan Kepulauan Riau dan pengantar tentang Kerjasama Sijori. Bagian ini memberikan setting historis mengenai perkembangan wilayah Kepulauan Riau sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, terutama di era Kerjasama Sijori.

Bab III Gambaran Perkembangan Batam dan Tanjungpinang yang berisi paparan mengenai perkembangan Batam sebagai pusat industri, sebagai realisasi Kerjasama Sijori, serta perkembangan Tanjungpinang yang juga merupakan respon dari kerjasama tiga negara tersebut. Bagian ini juga akan membahas mengenai arus lintas-batas manusia dan barang di kedua wilayah tersebut, serta relasi kekuasaan yang mendasarinya. .

Bab IV Kepulauan Riau di ambang abad ke-21, berisi paparan mengenai perkembangan dalam kerangka yang multidimensi meliputi perkembangan fisik dan non fisik dalam relasi yang berkaitan. Dengan kata lain, bagian ini memberikan gambaran mengenai proses 'pembentukan' Batam dan Tanjungpinang sebagai metropolitan di perbatasan.

Bab V berisi dampak Kerjasama Sijori di tingkat lokal, yang akan diangkat di bawah sebuah judul: Dilema Lokal. Dalam bagian ini dibahas mengenai dampak di tingkat lokal yang muncul karena kebijakan pemerintah pusat dan daerah berkenaan dengan pengembangan wilayah ini sebagai arena kerjasama multinasional.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran, sebagai sebuah garis merah yang menghubungkan topik-topik yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya untuk kemudian menjadi dasar dalam memberi rujukan.

BAB II

NEGERI SEGANTANG LADA

2.1 Lintas Sejarah Kepulauan Riau

Wilayah Kepulauan Riau terletak di bagian utara wilayah negara Indonesia dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Kepulauan berjuluk “segantang lada” ini memiliki ratusan pulau besar dan kecil yang tersebar di perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Pada masa lalu, kawasan ini dikenal dengan kejayaan Kesultanan Melayu di Malaka di abad ke-14. Kesultanan ini memiliki bandar pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal-kapal asing. Portugis mengambil-alih wilayah ini pada tahun 1511. Sejak itu, wilayah semenanjung dan pulau-pulau kecil di sekitarnya ini menjadi wilayah kekuasaan penguasa yang berganti-ganti, dari Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, Belanda lagi, sampai akhirnya terpecah menjadi wilayah kekuasaan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Di wilayah kepulauannya, Pulau Bintan dengan pusat kotanya Tanjungpinang memegang peran penting dalam sejarah kawasan ini. Tanjungpinang mulai dikenal pada abad ke-11 sebagai kota pelabuhan Kerajaan Bentan yang terletak di Bintan Bukit Batu. Pelabuhan ini kemudian diambil-alih oleh Kesultanan Melayu di Malaka. Letaknya yang strategis menjadikan Tanjungpinang sebagai salah satu tempat penting dalam strategi pertahanan dan perlawanan terhadap musuh. Pada masa Portugis kota ini menjadi basis pertahanan militer pendukung untuk mengatasi perlawanan penerus kekuasaan Kesultanan Melayu. Kekuasaan Portugis berlangsung sampai tahun 1619 akibat kekalahannya dalam pertempuran dengan Belanda. Belanda kemudian mengambil-alih seluruh wilayah kekuasaannya di Semenanjung Malaya.

Pada masa kekuasaan Belanda, tekanan yang kuat dari pihak kolonialis terhadap pewaris Kesultanan Melayu sangat kuat. Akibatnya, pusat kekuasaan kesultanan di Johor pada tahun 1680 dipindahkan ke Pulau Bintan, di sebuah tempat yang bernama Kota Piring (sekitar 6 kilometer dari pusat kota Tanjungpinang). Pada masa ini, Tanjungpinang yang terletak beberapa kilometer dari pusat pemerintahan, menjadi salah satu benteng pertahanan utama dalam menghadapi serangan Belanda.

Namun, dalam perang pada tahun 1784 yang berakhir dengan kekalahan pihak kesultanan, benteng ini akhirnya dikuasai Belanda. Seperti yang ditegaskan dalam perjanjian Utrecht, Kesultanan Melayu Riau harus mengakui kekuasaan Belanda dan menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya termasuk pelabuhan-pelabuhannya. Pusat pemerintahan kesultanan pun kemudian berpindah ke Daik-Lingga.

Belanda kemudian membangun Tanjungpinang sebagai basis pangkalan armada perangnya wilayah Riau. Pada tahun 1785 Residen Riau pertama ditempatkan di kota ini, menyusul kemudian dibangunnya sebuah dermaga. Tahun 1790, Tanjungpinang mulai dikenal sebagai pangkalan dagang dan mulai banyak pedagang asing yang menetap di kota ini seperti orang Cina, India, dan Arab.

Masuknya Inggris ke kawasan ini di akhir abad ke-18 merupakan awal pecahnya kawasan ini. Wilayah semenanjung (dan beberapa pulau kecil di sekitarnya) dan kepulauan yang dulunya merupakan satu wilayah kekuasaan terbagi menjadi dua. Wilayah semenanjung berada di bawah kekuasaan Inggris dan wilayah kepulauan menjadi bagian Belanda. Pada tahun 1795, Tanjungpinang sempat diserahkan kepada pihak Inggris dan baru diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1815. Belanda kembali menduduki Riau pada tahun 1818 dan memperoleh hak-haknya kembali seperti sebelumnya.

Sementara itu, pada tahun 1819 Inggris mulai membangun basis kekuasaan di Singapura yang tidak lama kemudian tumbuh menjadi bandar dagang yang cukup besar. Keberhasilan Inggris membangun Singapura ini mendorong Belanda untuk membangun Tanjungpinang sebagai bandar saingan, meskipun tidak cukup berhasil.

Belanda menghapuskan Kesultanan Melayu pada tahun 1911 dan menjadikan Tanjungpinang menjadi ibukota Karesidenan Riau yang membawahi beberapa wilayah di Riau daratan dan kepulauan. Pada masa Perang Dunia II, Jepang mengambil-alih Tanjungpinang dari kekuasaan Belanda pada tahun 1942.

Tanjungpinang memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia pada 18 Maret 1950, beberapa saat setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia pada 27 Desember 1949.

Pada masa kemerdekaan, wilayah kepulauan yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda otomatis menjadi wilayah negara Indonesia, sedangkan wilayah semenanjung dan pulau-pulau yang berdekatan bekas jajahan Inggris kemudian memperoleh kedaulatannya tidak lama berselang menjadi dua negara, Malaysia dan Singapura (sebelumnya merupakan satu wilayah).



Peta Kepulauan Riau

Sejak Tanjungpinang menjadi bandar dagang di awal abad ke-19, telah banyak pendatang yang menetap di kota ini, terutama orang Cina, Arab, dan India. hal ini dapat dilihat dari perkembangan pemukimannya. Di pusat kota yang sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan dikenal sebagai lokasi pemukiman para pedagang asing seperti orang Cina, Arab, dan India. Di tepi sebelah

utara, di sepanjang garis pantai terdapat pemukiman orang Melayu yaitu di Kampung Tambak. Sedangkan di bagian tepi timur di daerah yang berbukit terdapat Kampung Kemboja. Tepi bagian selatan terdapat Kampung Jawa dan Kampung Kolam yang dikenal sebagai lokasi pemukiman orang Jawa.

Pada masa itu, pulau-pulau di kawasan Kepulauan Riau masih belum berkembang, termasuk Pulau Batam. Pulau Batam baru mendapat perhatian dari pemerintah pada masa konfrontasi tahun 1963. Karena letaknya yang strategis, di jalur perdagangan internasional dan berhadapan dengan Singapura yang telah berkembang menjadi pusat ekonomi. Pulau ini dan beberapa pulau lainnya, seperti Karimun, Lingga, dan Kundur, dapat dikatakan mulai berkembang di era Kerjasama Sijori mulai direalisasikan (akhir dekade 80-an).

2.2 Kerjasama Sijori: Merekatkan Ikatan Lama

Menjelang akhir dekade 80-an, Singapura dan Malaysia telah menjadi pusat industri internasional baru. Pada pertengahan tahun 80-an, Singapura mulai mengalami stagnasi bahkan penurunan dalam perkembangan ekonomi yang pertama kalinya sejak memisahkan diri dari Malaysia. Pada tahun 1986, meningkatnya biaya tenaga kerja membuat pemerintahan Lee Kuan Yew menyatakan transformasi Singapura untuk sepenuhnya menjadi pusat bisnis atau "global city". Badan Perkembangan Ekonomi Singapura meminta perusahaan multinasional untuk hanya menempatkan kantor-kantor pusat di Singapura dan mulai memindahkan pabrik-pabriknya ke kawasan pinggiran di Asia, terutama Malaysia, Cina, Vietnam, dan Indonesia. Perkembangan ini menjadikan Singapura beranjak dari pusat ekonomi industri menjadi pusat korporasi multinasional.

Banyak kalangan menilai Kerjasama Sijori merupakan rangkaian strategi Singapura dalam membangun ekonomi globalnya (Barnard, 1997). Memasuki dua dekade akhir abad ke-20, Singapura telah beranjak dari negara industri menjadi pusat korporasi dunia yang pada puncak perkembangannya menuntut penciptaan kawasan hinterland internasional baru untuk memindahkan lokasi industrinya (Lindquist, 2002).

Stagnasi Perkembangan ekonomi Singapura terjadi karena kendala tempat dan sumberdaya. Hal ini mendorong negara pulau ini untuk mulai melirik kawasan sekitarnya yang masih memiliki wilayah bebas dan tenaga kerja murah. Dalam rangka inilah dicetuskan Kerjasama Sijori yang melibatkan Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan pertumbuhan di beberapa pulau di Kepulauan Riau dan Johor (kawasan pertumbuhan sekaligus wilayah industri baru bagi Singapura).

Kepulauan Riau merupakan lokasi yang sangat mendukung terpenuhinya kebutuhan Singapura karena letaknya yang cukup dekat dan menawarkan banyak keuntungan seperti lahan yang luas dan tenaga kerja yang murah. Bagi Indonesia sendiri, kerjasama ini juga menjadi salah satu jalan keluar untuk peningkatan pendapatan negara dan pengembangan kawasan. Adanya kepentingan ekonomi dalam kerjasama ini membuat pemerintah Indonesia memfasilitasi kerjasama ini dengan melakukan perubahan hukum lokal dengan menjadikan Batam sebagai zona ekonomi berikat. Sampai saat ini Batam merupakan satu-satunya kawasan berikat (*bonded-area*) di dunia (Kompas, 22 Maret 2001). Sistem ini telah memungkinkan Batam, Riau, dan pemerintah Indonesia, meraih banyak keuntungan dalam kerjasama ekonomi global.

Dalam beberapa dekade terakhir, Kerjasama Sijori ini memang telah membuka peluang kerja yang cukup luas. Bahkan, Kepulauan Riau mulai dianggap sebagai magnet baru para pencari kerja. Beberapa kota yang masuk dalam wilayah pertumbuhan seperti Batam, Tanjungpinang, dan Tanjungbalai-Karimun mulai tumbuh menjadi kota-kota modern, metropolitan-metropolitan baru di Kepulauan Riau. Ketiga kota ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas pemerintahan tingkat dua, tetapi juga menjadi pusat ekonomi dan sosial budaya bagi kawasan di sekitarnya.

Sebagai sebuah proyek 'primadona' pemerintah pusat, wilayah Kepulauan Riau pun mendapat banyak keistimewaan. Salah satunya dalam keimigrasian. Kelonggaran aturan keimigrasian di berikan kepada wilayah ini untuk membuka peluang yang lebih luas dalam hubungan kerjasama ekonomi dengan dunia luar. Arus keluar-masuk dari dan ke luar negeri sangat mudah karena adanya kelonggaran pajak fiskal di Propinsi Riau (di semua pelabuhan keluar negeri, warga Negara Indonesia dipungut pajak setiap kali mereka ke luar negeri. Pajak ini

besar-kecilnya tergantung pada bagaimana seseorang akan pergi, apakah melalui jalur darat, air, atau udara. Berpergian ke luar negeri melalui jalur udara pajak fiskalnya paling mahal, mencapai \$100. Di Riau, pajak fiskal dihapuskan pada tahun 1983. Kemudahan fasilitas keimigrasian ini dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi investor asing yang membangun bisnis atau menanamkan modal di kawasan ini (Linguist, 2002). Fasilitas ini, juga memungkinkan arus lintas-batas dari wilayah Riau, khususnya Kepulauan Riau, ke negara-negara tetangga, baik dalam kerangka ekonomi (arus lintas-batas barang dan tenaga kerja) maupun sosial budaya.

2.3 Magnet Baru Para Pendetang

Dampak dari perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di era Kerjasama Sijori di Batam dan Bintan adalah meningkatnya jumlah penduduk karena migrasi. Dalam sepuluh tahun terakhir, dapat dikatakan Kepulauan Riau merupakan tempat tujuan para pendatang untuk memperoleh peluang ekonomi (Mubyarto, 1993, 1997).

Daya tarik magnet ini semakin kuat karena kondisi ekonomi di berbagai daerah lain di wilayah Indonesia yang cenderung stagnan. Peluang kerja di Jawa, terutama di sektor formal, hampir dapat dipastikan tidak dapat lagi menampung angkatan kerja yang ada. Sedangkan, perkembangan sektor informal pun sudah mulai mendekati titik jenuh. Kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, merupakan gambaran kota-kota yang padat penduduk dan tingkat pengangguran yang tinggi. Di balik gedung-gedung tinggi yang mendominasi wajah kota, tersembunyi kemiskinan, pemukiman kumuh, anak jalanan, dan kriminalitas yang semakin meningkat.

Sementara, di wilayah pedesaannya, menyempitnya lahan pertanian karena perkembangan kota telah membuat masyarakat petani banyak kehilangan lahan hidup mereka. Desa-desa petani ini pun mulai ditinggalkan generasi mudanya untuk mencari kehidupan yang 'lebih baik' di kota. Arus urbanisasi ini menyerbu kota-kota dan membuatnya semakin padat. Bila sebelumnya, Jakarta selalu dianggap sebagai 'kota impian' para perantau, maka memasuki dekade 90-an, Batam adalah 'surga' dalam khayalan mereka.

Batam memiliki luas lahan 715 km². Pada tahun 2001, jumlah

penduduk Kota Batam diperkirakan telah mencapai angka 460.000 jiwa, dan diperkirakan masih terus akan bertambah setiap tahunnya (Kompas, 11 Mei 2001). Bahkan, angka ini diperkirakan akan mencapai 700.000 jiwa di tahun 2006 nanti. Sedangkan Kota Tanjungpinang, pada tahun 2002 jumlah penduduk telah mencapai 158.649 jiwa, dari tahun sebelumnya 137.356 jiwa dengan luas wilayah 239,5 km². Kenaikan jumlah penduduk memang jauh lebih pesat di Batam dibandingkan di Tanjungpinang, maupun wilayah lain di Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan oleh, lapangan kerja yang ada di Batam jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain tersebut. Sejak awal pulau ini memang dibangun untuk menjadi pusat aktivitas industri dan perdagangan di kawasan Kepulauan Riau.

Perkembangan Batam yang diikuti dengan promosi besar-besaran yang menampilkan Batam sebagai “surga” bagi para pencari kerja. Akibatnya, mulai tahun 90-an arus migrasi ke pulau ini mulai mengalami peningkatan. Pecahnya krisis moneter dan ketidakmenentuan politik di tahun 1997, memicu ledakan arus pendatang ke Batam. Hal yang sama juga terjadi di Bintan. Hanya saja di pulau ini sebagian besar pendatang hanya transit sementara untuk menuju ke lokasi lain, seperti ke Singapura atau Malaysia, atau bahkan Batam, karena di pulau ini lapangan pekerjaan, seperti industri-industri jumlahnya tidak banyak. Untuk menampung tenaga kerja dari wilayah sekitarnya pun tidak mencukupi, sehingga sangat sedikit tenaga kerja dari daerah lain yang dapat masuk.

Baik di Batam maupun di Bintan, pecahnya krisis ekonomi tahun 1997 juga menjadi iklim yang subur bagi perkembangan industri “remang-remang” (prostitusi). Industri ini mengalami masa booming di tahun 1998, setelah ekonomi Indonesia mengalami kejatuhan yang sangat parah. Dapat dikatakan, saat sektor ekonomi, terutama sektor formal, mengalami kejatuhan, sektor informal yang satu ini justru banyak diuntungkan. Apalagi setelah dollar Singapura mulai stabil, justru semakin banyak wisatawan Singapura yang datang untuk seks. Kurs dollar Singapura yang telah stabil memiliki perbandingan sekitar 1:3 dengan rupiah di akhir dekade 90-an.

Pukulan krisis ekonomi membuat banyak industri di Batam mulai membatasi tenaga kerjanya. Sementara, limpahan para pendatang

tidak pernah surut. Akibatnya, tingkat pengangguran dan ketidakpastian pun meningkat. Dampak melimpahkan para pendatang ini juga memicu munculnya permasalahan baru yang terkait dengan lingkungan, yaitu masalah perumahan, air, dan energi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Bintankhususnya Tanjungpinangtelah lebih dulu menghadapi krisis energi. Banyak perumahan yang tidak berpenghuni karena tidak ada listrik. Pihak developer pun tidak dapat berbuat apa-apa karena memang kapasitas listrik sudah mencapai batasnya. Sementara, di sepanjang ruas-ruas jalan utama mulai banyak berdiri ruko-ruko (rumah dan toko) yang juga kosong. Kosongnya deretan ruko-ruko sebagian besar adalah juga karena tidak adanya listrik.

“...saya sudah satu tahun lebih membeli rumah di kompleks perumnas di Batu XI, tetapi hingga saat ini rumah itu belum bisa saya tempati karena tidak ada listrik. Pihak developer menyarankan untuk menyambung listrik dari tetangga yang terdekat dari rumah, karena pihak PLN tidak menerima permintaan sambungan baru katanya” (Pian, 34 tahun).

Masalah listrik memang membuat orang Tanjungpinang menjadi serba salah. Bila pilihan solusinya adalah menyambung ke rumah tetangga, seringkali juga menimbulkan adalah baru yang muncul karena ketidaknyamanan pemilik rumah yang memiliki sambungan listrik. Akibatnya, orang lebih memilih untuk tidak meninggalkan rumah yang telah mereka beli sebelum ada sambungan listrik resmi. Hanya saja, pihak developer seringkali tidak jujur kepada konsumen. Mereka menjanjikan listrik akan segera tersambung begitu konsumen sudah membayar uang muka. Kenyataannya, ketika konsumen akan memasuki rumah mereka listrik belum terpasang juga. Bahkan, ada beberapa developer yang setengah 'memaksa' penghuni lama untuk 'memberikan' listriknya pada tetangga yang baru. Hal ini tentu saja membuat penghuni lama pun menjadi tidak nyaman karena terganggu privasinya di wilayah yang seharusnya sangat pribadi.

Menurut sumber dari kantor PLN Tanjungpinang di bagian pemasaran, kapasitas tenaga listrik memang telah melampaui batas,

selain karena banyaknya permintaan juga karena mesin pembangkit yang sudah tua dan sering rusak. Dari data statistik (Bappedako Tanjungpinang dan BPS Kepulauan Riau, 2003), di wilayah Kota Tanjungpinang terdapat 17 mesin pembangkit di kantor cabang Tanjungpinang dan Penyengat. Tenaga listrik yang mampu dibangkitkan mencapai 181,7 juta Kwh, dengan pemakaian sebesar 129.119.442 Kwh. Dari angka ini sebenarnya kapasitasnya masih cukup memadai. Namun, dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan yang membutuhkan daya besar, seperti lokasi kantor dan toko, maka wajar bila terjadi peningkatan pesat dalam jumlah daya yang dipakai. Bahkan, sumber tersebut mengatakan sampai tahun 2004 dipastikan mereka tidak melayani permintaan sambungan baru bila tidak ada penambahan mesin pembangkit baru.

Sementara, Batam mulai menghadapi krisis air bersih karena banyaknya penebangan hutan untuk dijadikan lokasi industri (Sijori Pos, 15 Juni 2002). Penebangan hutan besar-besaran yang terjadi di berbagai tempat di Pulau Batam ditengarai telah membuat kerusakan lingkungan yang berakibat pada reservasi sumber air tanah. Kekurangan sumber air bersih ini juga dikarenakan naiknya kebutuhan dengan semakin meningkatnya jumlah industri, perkantoran, fasilitas umum lainnya, dan jumlah penduduk.

Melimpahnya pendatang juga memunculkan masalah 'tercemarnya' tata kota di Batam karena munculnya perumahan liar (ruli) di lahan-lahan kosong yang berada dekat dengan pusat kota. Dari tahun ke tahun jumlahnya semakin banyak. Munculnya perumahan liar ini disebabkan oleh kurangnya perhatian baik pihak investor maupun pemerintah daerah untuk membuat kompleks perumahan murah yang berada di dekat lokasi industri. Selama ini kompleks perumahan murah di bangun jauh dari lokasi industri maupun aktivitas ekonomi. Padahal sebagian besar penghuninya adalah para pekerja menengah ke bawah yang penghasilannya pas-pasan bila harus membayar ongkos transportasi ke tempat kerja yang jauh. Pilihan tinggal di ruli pun menjadi solusi yang paling realistis bagi kalangan pekerja ini.

Bagi Batam, julukan sebagai magnet baru atau 'surga' bagi para pendatang kini telah menjadi sebuah ironi. Di satu sisi, pemerintah dan pihak investor menggembar-gemborkan keberhasilan Batam sebagai

dalah satu lokomotif ekonomi Indonesia. Sementara, para pendatang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di wilayah ini sangat sedikit menerima imbas keberhasilan yang dicapai kota ini. Kemiskinan, ketidakpastian, kekacauan, dan kriminalitas berbaur menjadi satu dengan modernitas, budaya konsumsi, gaya hidup, dan ekonomi global dalam setting kota yang disebut metropolis perbatasan ini.

Dalam tulisan ini akan dikemukakan perkembangan dua kota utama, Batam dan Tanjungpinang. Pembahasan mengenai Tanjungpinang nantinya akan juga menyinggung dua titik dua pusat aktivitas ekonomi penting yang masih berada satu pulau dengan Tanjungpinang, yaitu Lobam dan Lagoi. Keduanya merupakan wilayah khusus yang menjadi lokasi kerjasama ekonomi berskala global. Kedua pusat ekonomi yang berada di ujung Pulau Bintan ini dianggap memberikan imbas terhadap Kota Tanjungpinang, langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu diangkat dalam relasinya dengan perkembangan Tanjungpinang.

BAB III

BATAM dan TANJUNG PINANG

3.1 Batam: Dari Pulau Kelapa ke Rimba Beton

Perkembangan Batam menandai perkembangan kawasan Kepulauan Riau pada umumnya. Ide pengembangan Batam muncul pasca pasca konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963. Pada masa itu, pulau yang berhadapan dengan Singapura ini hanya dihuni oleh beberapa ribu nelayan dan pemilik kebun kelapa. Sebelum konfrontasi, penduduk Batam sering keluar-masuk Singapura untuk menjual hasil tangkapan nelayan dan hasil bumi mereka dengan menggunakan perahu sederhana. Apalagi jarak antara Batam dengan Singapura cukup dekat, hanya 20 km laut dari Batam.

Jaringan perdagangan tradisional antara penduduk Pulau Batam, seperti halnya dengan pulau-pulau terdekat lainnya, dengan Singapura pun sudah terjalin sejak lama, bahkan sejak Belanda masih menguasai kawasan ini. Bagi penduduk pulau-pulau di Kepulauan Riau, terutama yang dekat Singapura yang pada masa kekuasaan Inggris mulai berkembang menjadi pusat perdagangan, Singapura adalah pasar utama untuk memasarkan hasil bumi dan tangkapan laut, dibandingkan dengan Tanjungpinang yang juga menjadi pelabuhan dagang Belanda. Hubungan berlatar historis ini terus berlanjut hingga sekarang, meskipun dengan bentuk yang berbeda.

Pulau Batam dianggap memiliki prospek. Letak pulau ini dianggap cukup cerah karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Dengan berakhirnya konfrontasi dan dimulainya rekonsiliasi dengan negara Singapura dan Malaysia, pulau ini juga dianggap cukup strategis untuk menyerap perkembangan Singapura yang telah tumbuh menjadi pusat ekonomi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, di era pemerintahan Orde Baru, pulau ini pun menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi negara. Perusahaan perminyakan negara, Pertamina, pun melihat lokasi Batam sangat strategis sebagai basis logistik dan lokasi pengolahan minyak. Pertamina kemudian memakai Pulau Sambu yang terletak di antara Singapura dan Batam sebagai lokasi kegiatannya sampai sekarang.

Penggarapan Batam menjadi kawasan industri dan kerjasama dimulai sejak tahun 1971 dengan dibentuknya Badan Pimpinan Daerah Industri Batam yang ditetapkan dengan Dekrit Presiden. BPDIB ini pada mulanya dipimpin oleh Direktur Pertamina masa itu, Ibnu Sutowo.

Pengembangan Batam dilaksanakan dalam tiga periode. Periode pertama, tahun 1971-1976 adalah periode persiapan yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo. Pada periode ini mulai dijalankan pembangunan prasarana dasar, seperti jalan-jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Dilanjutkan dengan periode kedua pada kurun waktu tahun 1976-1978 yang merupakan periode orientasi atau konsolidasi yang dipimpin oleh JB Sumarlin. Pada periode ini Batam mulai ditetapkan sebagai Kawasan Berikat Bebas Pajak untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan.

Selanjutnya, sampai tahun 1998 pengembangan Batam berada di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi, yaitu BJ Habibie. Pada periode ini dilakukan penyempurnaan konsep dan penanaman modal besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, listrik, telekomunikasi, pelabuhan laut, bandar udara, dan pelayanan umum. Setelah ketiga periode ini berakhir, pengembangan Batam selanjutnya berada di bawah koordinasi Badan Otorita Batam (BOB).

Sejak awal pembangunannya, kota ini memang diarahkan untuk menjadi pusat industri dan perdagangan dengan mengandalkan fungsinya sebagai pelabuhan transit. Oleh karena itu, infrastruktur pendukung sebuah kota transit menjadi perhatian utama seperti pelabuhan laut untuk kapal penumpang dan kapal kargo, serta pelabuhan udara internasional. Batam memiliki beberapa pelabuhan dengan fungsi yang berbeda, seperti pelabuhan Punggur sebagai pelabuhan ferry antar pulau di wilayah Kepulauan Riau, pelabuhan Sekupang yang terbagi dua menjadi pelabuhan ferry antar pulau di Kepulauan Riau dan pelabuhan kapal besar yang melayani jalur pelayaran Belawan (Sumatera Utara), Jawa, dan Indonesia bagian timur. Selain itu, yang baru selesai dibangun, sebuah pelabuhan internasional untuk ferry ke Singapura dan Malaysia di pantai utara Batam, di kawasan Batam Center (mulai beroperasi di tahun 2004). Masih ada lagi pelabuhan kargo di Batu Ampar. Kemudahan transportasi ini mendukung perkembangan kota ini sebagai

pusat aktivitas ekonomi di kawasan Kepulauan Riau.

Investor asing mulai tertarik untuk berinvestasi di Batam sejak tahun 1983. Masuknya investor-investor asing membuat wajah kota mulai berubah. Tidak hanya dari fisiknya dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri, baik pabrik-pabrik, perumahan, maupun leisure places. Pulau ini pun berkembang dengan atmosfer kota sempadan yang berbeda, yang merangkum berbagai paradoks kota transisional. Lapangan golf, marina, dan komunitas jet-set berkembang bersama pabrik-pabrik, pemukiman liar (ruli), bar, karaoke, dan rumah-rumah bordil.

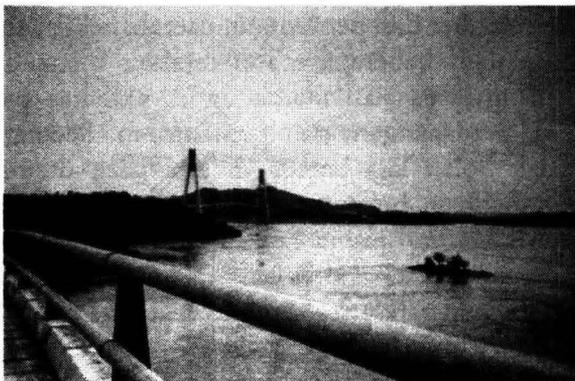
Iklim investasi yang kondusif dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat menjadikan perkembangan kota ini terjadi sangat cepat. Dalam kurun waktu 20 tahun, pulau yang sebelumnya hanya berupa hutan kini telah menjadi rimba beton. Kawasan hutan yang masih tersisa pun mulai dibuka dan diratakan, siap untuk menjadi lokasi bangunan-bangunan baru.

Sekarang ini, Batam telah tumbuh menjadi kota besar dengan jalan-jalan aspal 6-8 jalur membentang membelah pulau. Di bagian pusat kota terdapat pusat-pusat perdagangan, mal-mal, dan di sepanjang jalan utama mata kita akan terpaku pada pemandangan monoton deretan ruko-ruko berbagai bentuk dan gaya arsitektur. Ruko-ruko inilah yang mendominasi wajah fisik kota Batam dan menjadi representasi dari prioritas perkembangan ekonomi yang dituju selain industri, yaitu perdagangan.

Menurut sumber dari pemerintah daerah, kebijakan baru dalam pengembangan Batam beberapa tahun terakhir menentukan ruang-ruang di sepanjang jalan-jalan utama untuk aktivitas publik seperti wilayah industri, perdagangan, dan perkantoran. Sedangkan wilayah perumahan, tidak boleh lagi berada di tepi jalan utama, meskipun perumahan elit. Bahkan, beberapa rumah yang terletak di tepi jalan utama, yang telah berdiri selama beberapa tahun, harus dirobohkan untuk dialih-fungsikan sebagai lokasi ruko. Beberapa kompleks perumahan elit memang banyak ditemui di pusat-pusat kota, tetapi letaknya selalu berada di belakang deretan ruko. Di luar pusat kota pun demikian. Lokasi perumahan selalu berada di belakang deretan ruko yang ada di tepi jalan utama.

Di pusat kota, ada beberapa pusat industri seperti Batamindo dan Muka Kuning. Lokasinya mirip dengan kota satelit yang di dalamnya terdapat ratusan pabrik yang menampung ribuan tenaga kerja. Pusat-pusat industri ini dibangun terpadu dengan kompleks perdagangan yang berada di bagian luar. Tidak jauh dari pusat-pusat industri tersebut, dapat ditemui kompleks-kompleks pemukiman liar yang menempati lahan kosong milik investor yang belum dibangun. Ruli yang menyeruak di antara bangunan-bangunan beton ini menyiratkan adanya kontradiksi dari perkembangan kota Batam yang menyimpang dari skenario utama sebuah pembangunan ekonomi global yang telah dirancang secara matang, sebuah kenyataan yang merangkum paradoks kota, atau bahkan sebagai potret kegagalan.

Sementara itu, pengembangan Batam terus dilaksanakan, tidak hanya dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada di pulau ini saja tetapi meluas hingga ke pulau-pulau kecil terdekat. Mulai tahun 1992, melalui Keppres nomor 28 tahun 1992, beberapa pulau yang berdekatan dengan Batam seperti Rempang, Galang, dan sekitarnya dimasukkan dalam wilayah kerja Otorita Batam. Pengembangan wilayah di kawasan ini dikenal dengan proyek Barelang yang membuat jembatan penghubung antara Batam dengan beberapa pulau kecil yaitu pulau-pulau: Tonton, Nipah, Satoko, Rempang, Galang, dan Galang Baru. Pulau-pulau ini terhubung dengan enam jembatan “Trans-Barelang” yang membentang sepanjang 54 kilometer. Dengan proyek perluasan kawasan ini, maka luas Batam sekarang mencapai 620 km.²



Jembatan Barelang

Penyatuan” pulau-pulau kecil ini adalah untuk perluasan kawasan industri dan pemukiman, meskipun hingga beberapa tahun kemudian hasilnya belum begitu terlihat. Dapat dikatakan, di pulau-pulau tersebut belum ada pembangunan fisik yang berarti. Namun, jembatan yang dibangun dengan dana sangat besar ini juga telah menjadi objek wisata yang menarik bagi wisatawan-wisatawan domestik.

Perkembangan Batam dalam dua dekade ini telah banyak menyerap dana investasi asing cukup besar. Sejak 1978-1999 Otorita Batam telah menghimpun US\$ 7 M yang berasal dari pemerintah sebesar 23 persen dan dari swasta 77 persen. Target untuk lima tahun berikutnya, investasi dapat mencapai US\$12 M (Rp 85 triliun). Hingga saat ini program pembangunan Batam masih ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat industri dan perdagangan baru di seluruh pulau dengan menggalakkan penanaman modal asing. Iklim yang kondusif diciptakan untuk merangsang hasrat investor dalam menanamkan modal. Infrastruktur terus menerus disempurnakan untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi investor. Begitu pula dengan urusan birokrasi dan perijinan yang dirancang untuk memudahkan urusan para investor tersebut. Pendek kata, segala sesuatu di Batam memang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi investor, terutama investor asing.

Tidak heran, bila di pulau bertanah merah ini, setiap hari selalu ada lahan yang dibuka. Pada lahan yang sudah dibuka ini akan segera muncul bangunan-bangunan baru berupa deretan ruko, perumahan, atau pabrik-pabrik. Dapat dikatakan, setiap hari wajah Batam selalu berubah dengan adanya bangunan baru yang berdiri tegak siap untuk beraktivitas.

Pada tahun 1999 dengan UU nomor 2 tahun 1999 Batam resmi menjadi Kota Otonom dengan pusat wewenang pada Pemda Kota Batam. Selama ini terdapat dua manajemen pengelolaan di pulau industri ini yaitu Pemda Kodya Batam dan Otorita Batam. Pemda bertanggungjawab terhadap administrasi kemasyarakatan, kependudukan, dan pemerintahan, sedangkan Otorita Batam mengelola administrasi pembangunan berskala besar meliputi infrastruktur, pengelolaan pengembangan sektor riil seperti manufaktur. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka tanggung-jawab manajemen pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan

sepenuhnya ke tangan Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam hanya akan menjadi pelengkap atau mitra.

Beberapa agenda penting yang dijalankan oleh Pemda sejak pengalihan wewenang dari Otorita Batam adalah melakukan pembenahan infrastruktur penting seperti jalan dan pelabuhan laut, serta penertiban kependudukan untuk mengendalikan arus migrasi yang semakin meningkat. Masalah kependudukan yang dihadapi oleh Batam bersumber pada tingginya tingkat migrasi dari luar daerah ke kota ini. Dampaknya muncul dalam semakin meningkatnya kriminalitas dan pemukiman liar. Dalam beberapa tahun terakhir ini keberadaannya dianggap telah sampai pada tahap meresahkan tata kota. Agenda ini diharapkan akan mengembalikan Batam pada planning semula sebagai pusat industri dan perdagangan yang mapan dengan tata lingkungan dan manajemen kependudukan yang rapi.

3.2 Tanjungpinang: Mengejar Keteringgalan

Tanjungpinang, pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Pulau Bintan mulai dibangun pada akhir tahun 50-an. Berbagai instansi pemerintah, militer, dan sekolah-sekolah baru yang muncul pada dekade ini menandai awal perkembangannya. Meskipun pada masa kolonial Belanda memerintah di kawasan ini Tanjungpinang telah dibangun sebagai sebuah pelabuhan dagang, namun perannya tidaklah begitu besar dalam perdagangan antar kawasan. Tanjungpinang tetaplah hanya menjadi pelabuhan transit kecil yang perekonomian kotanya digerakkan oleh pedagang perantara skala menengah.

Kota ini lebih dikenal sebagai pusat pemerintahan. Apalagi dengan statusnya sebagai ibukota karesidenan, dilanjutkan sebagai ibukota propinsi, dan sebagai ibukota kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari struktur sosial masyarakat pada tahun 50-an, di mana kalangan pegawai negeri dan militer yang sebagian besar bukan orang setempat menempati kelas menengah bersama dengan para pedagang besar.

Sebagai kota yang berada di perbatasan dengan Singapura dan Malaysia yang sampai tahun 1957 masih berada di bawah kekuasaan Inggris, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tanjungpinang sering dikatakan sangat tergantung pada Singapura (Kotif Tanjungpinang, 1997). Perekonomian kota ini digerakkan oleh arus lintas-batas manusia

dan barang dengan dua negara tetangga. Pada masa itu, hubungan dengan kawasan beda negara ini berlangsung dengan bebas, sesuai dengan predikatnya sebagai wilayah bebas pabean. Orang Tanjungpinang dapat dengan bebas pergi ke Singapura dan Malaysia dengan membawa barang dagangan. Pun sebaliknya. Malahan, mata uang yang beredar sehari-hari di Tanjungpinang sebelum pecahnya konfrontasi adalah dollar Singapura.

Kondisi ini berubah dengan pecahnya konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963. Secara formal, peristiwa ini merupakan penegasan batas negara Indonesia dengan Singapura dengan kebijakan dedollarisasi (Liarsi, 1989: 33). Diikuti dengan nasionalisasi wilayah frontier di wilayah Riau melalui serangkaian kebijakan pengawasan arus perdagangan lintas-batas dan penghapusan status bebas pabean. Orang Tanjungpinang tidak lagi dapat dengan bebas melakukan kegiatan perdagangan dengan kedua negara tetangga.

Akibat dari kebijakan tersebut, kondisi perekonomian Tanjungpinang pun memburuk. Barang kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya berasal dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysiamenjadi susah diperoleh. Padahal, pasokan untuk kebutuhan sehari-hari dari dalam negeri belum dapat diandalkan, karena hambatan transportasi.

Keadaan ini terus berlanjut walaupun konfrontasi telah lama berakhir. Perdagangan lintas-batas bagaimanapun harus dilakukan sesuai prosedur yang diberlakukan. Walaupun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran, termasuk masih banyaknya para penyelundup yang menyelundupkan berbagai barang dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berkat para penyelundup inilah kebutuhan masyarakat akan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang-barang prestisius dapat terpenuhi.

Keadaan perekonomian ini mendorong pemerintah daerah setempat mengajukan usulan untuk mengembalikan status bebas pabean. Namun, usulan yang dimaksudkan untuk memperbaiki perekonomian wilayah ini tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Tanjungpinang baru bangkit kembali dengan dimulainya program pembangunan lima tahun (Pelita) pada tahun 1969. Dengan dana pembangunan ini, pembenahan kota mulai dijalankan, khususnya

dengan membangun infrastruktur kota seperti jalan-jalan, bangunan-bangunan instansi pemerintah, dan fasilitas umum.

Beberapa dekade berikutnya, realisasi Kerjasama Sijori membawa perubahan besar di Pulau Bintan, termasuk Tanjungpinang dan kawasan sekitarnya. Kerjasama tersebut menciptakan dua lokasi kerjasama multinasional yaitu Lobam sebagai sentra industri menengah untuk garmen dan elektronik, serta Lagoi sebagai sebagai resor eksklusif bertaraf internasional.

Walaupun demikian, perkembangan Tanjungpinang, tidaklah sepesat Batam. Boleh dikatakan, justru semakin tenggelam di bawah ketenaran Batam yang kian hari kian gemilang. Beberapa tahun lampau, Tanjungpinang yang berada di ujung Pulau Bintan dikenal sebagai pelabuhan transit kapal tujuan Jakarta-Belawan. Dalam waktu transit ini banyak penumpang memanfaatkan kesempatan untuk berbelanja ke pasar Tanjungpinang dan membeli barang-barang impor yang harganya relatif murah. Ketika Batam mendapatkan status bonded-area, perdagangan barang-barang impor di Tanjungpinang mulai sepi, terkalahkan oleh Batam (Riau Pos, 22 Januari 2002). Di pasar Tanjungpinang, berbagai barang impor memang masih dapat dijumpai dengan mudah, tetapi harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan Batam.



Jln. Merdeka: Pusat Perbelanjaan di Tanjungpinang

Berbeda dengan Batam yang merupakan wilayah perdagangan bebas, sehingga arus lintas-batas jauh lebih leluasa, sedangkan di Tanjungpinang, arus lintas-batas barang harus melalui 'jalur tidak resmi' yang dibawa oleh para penyelundup. Harga barang kemudian menjadi lebih mahal karena risiko hukum yang dihadapi oleh para penyelundup ini. Tidak jarang mereka juga harus membayar pungutan 'pajak tak resmi' kepada oknum-oknum penegak hukum agar lolos dari proses hukum.

Perkembangan kawasan Pulau Bintan secara keseluruhan terkesan lambat dan tidak menyediakan peluang kerja sebesar Batam. Hal inilah juga yang membuat para pendatang kurang begitu antusias dengan pulau ini. Sekarang ini, menurut data statistik Kota Tanjungpinang (Bappedako Tanjungpinang dan BPS Kepulauan Riau, 2003), di Tanjungpinang terdapat 63 perusahaan industri besar dan sedang yang menyerap 2.951 tenaga kerja. Tahun sebelumnya, jumlah industri besar dan sedang hanya 23, tetapi justru lebih banyak menyerap tenaga kerja, yaitu 3.676 tenaga kerja.

Ketidakmenentuan ekonomi, turunnya permintaan pasar, serta naiknya nilai tukar rupiah membuat banyak industri besar menerapkan strategi efisiensi untuk mengurangi risiko kerugian. Industri-industri besar yang mempekerjakan lebih dari 100 orang, pun banyak beralih menjadi industri berskala sedang yang mempekerjakan antara 20-99 tenaga kerja. Dengan strategi ini, bila permintaan mengalami penurunan, beban produksi lebih dapat diminimalisasi. Sedangkan bila permintaan tiba-tiba melonjak, mereka tetap dapat melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan memanggil pekerja lama atau merekrut tenaga kerja baru. Strategi lain yang juga diterapkan oleh banyak perusahaan untuk meminimalisasi kerugian dalam proses produksi adalah dengan kontrak pendek per enam bulan hingga satu tahun, sama dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Batam (lihat subbab sebelumnya). Inilah yang membuat industri di kota Tanjungpinang seperti mengalami stagnasi, meningkat dalam jumlah tetapi menurun daya serap terhadap tenaga kerjanya.

Bintan, khususnya Tanjungpinang, memang hanya memiliki sedikit lokasi industri. Hal ini sangat mungkin karena prioritas pengembangan Tanjungpinang memang bukan untuk menjadi pusat industri seperti halnya Batam. Prioritas pembangunan ditujukan untuk

pariwisata dan perdagangan, yang sebenarnya juga kurang berkembang optimal. Meskipun demikian, ada dua tempat di Pulau Bintan yang cukup dapat diandalkan untuk mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu, Lobam dan Lagoi. Keduanya merupakan proyek kerjasama multinasional yang masuk ke wilayah ini di era Sijori. Lobam merupakan pusat industri yang terletak di Bintan Utara. Sedangkan Lagoi merupakan resort bertaraf internasional, juga berada di Bintan Utara.

BAB IV

KEPULAUAN RIAU AMBANG ABAD KE-21

4.1 Lintas Manusia dan Barang

Arus lintas manusia dan barang menjadi perhatian dalam kajian mengenai masyarakat perbatasan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk menjalin relasi pertukaran yang saling menguntungkan. Bagi wilayah Kepulauan Riau, arus lintas manusia dan barang punya makna ekonomi yang cukup tinggi. Wilayah yang cukup luas dengan ratusan pulau ini memiliki tenaga kerja berjumlah besar, yang sebagian besar tidak dapat tertampung dalam sektor pekerjaan formal. Meskipun sektor pekerjaan formal sudah meningkat jumlahnya dengan cukup pesat di era Sijori. Masalahnya, mereka harus bersaing dengan para pendatang yang jumlahnya nyaris sama besar dengan jumlah penduduk asli.

Sementara, di negara tetangga, perkembangan perekonomian yang cukup pesat didukung dengan tingkat pendidikan yang terus meningkat, menyisakan kebutuhan peluang pada sektor pekerjaan kasar. Peluang inilah yang coba dimanfaatkan oleh orang Indonesia dengan bekerja di negara tetangga.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan ekonomi negara tetangga, baik Singapura dan Malaysia, juga telah membuka pasar barang-barang dari negar-negara industri di belahan dunia manapun. Ini juga merupakan peluang pada mereka yang bergerak di perdagangan. Letak yang cukup dekat dengan negara tetangga membuat arus lintas barang pun dengan mudah dapat masuk ke wilayah Kepulauan Riau, melalui jalur resmi maupun tidak. Menariknya, ternyata yang dibawa masuk ke wilayah Kepulauan Riau pun bukan hanya barang-barang baru, tetapi juga barang-barang bekas, yang justru memiliki pasar yang sangat luas.

Bagian ini akan membahas arus lintas manusia, khususnya tenaga kerja, dan barang yang melintasi perbatasan Indonesia, melalui Kepulauan Riau, dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

4.1.1 Basis Pengiriman Tenaga Kerja

Wilayah Kepulauan Riau, begitu juga dengan wilayah lain yang

berada di perbatasan dengan negara lain, sering dianggap sebagai wilayah yang rawan kejahatan imigrasi, baik berupa penyelundupan barang atau orang, maupun pemanipulasian data keimigrasian.

Terlebih dengan perkembangan ekonomi negara tetangga, Singapura dan Malaysia, yang jauh melesat di atas Indonesia yang telah membukakan peluang kerja. Kedua negara ini membutuhkan pasokan tenaga kerja kasar (juga berupah murah) yang cukup besar.

Peluang ini ditanggapi dengan cepat oleh para pengusaha Jawa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Sejak akhir tahun 80-an, bermunculannya agen-agen pemasok tenaga kerja yang beroperasi hingga ke pelosok pedesaan di Jawa. Keadaan ekonomi di Jawa yang tidak menentu menjadi pendorong calon tenaga kerja (*canaker*) untuk mencoba mengadu nasib ke negara tetangga. Ditambah lagi dengan cerita para perantau yang berhasil semakin memompa semangat untuk mengikuti jejak mereka.

Setelah tujuan Arab dan negara-negara Timur Tengah lainnya, menyusul tujuan lain yang lebih dekat, Singapura dan Malaysia. Sejak itulah muncul beberapa titik transit tenaga kerja di Kepulauan Riau, di antaranya yaitu Batam, Tanjungpinang, Tanjungbalai-Karimun, dan beberapa pulau kecil seperti Belakang Padang. Tempat-tempat ini menjadi transit sebelum calon tenaga kerja ini diberangkatkan ke negara tujuan, secara legal maupun illegal. Sampai tahun 90-an, pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) illegal masih banyak terjadi, terutama untuk pekerja laki-laki di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Sementara untuk yang melalui jalur legal, para calon tenaga kerja ini membuat kartui penduduk dan paspor di tempat transit, tentu saja melalui prosedur “khusus” yang membutuhkan biaya mahal.

Di Tanjungpinang, pada tahun 90-an, dalam sebulan calon tenaga kerja yang masuk disinyalir mencapai angka ribuan. Perkiraan ini dari jumlah penumpang kapal dari Jawa (rata-rata seminggu dua kali kapal berlabuh) yang kadang mencapai 1.300 penumpang (perkiraan kasar dari jumlah penumpang yang turun dari pelabuhan Kijang dari Jakarta). Dari jumlah ini diperkirakan dua pertiganya adalah calon tenaga kerja. Mereka ini kemudian ditampung di penampungan perusahaan penyalur. Di sinilah mereka menunggu giliran untuk diberangkatkan, setelah sebelumnya dibuatkan paspor dan permit (izin kerja di luar negeri).

Waktu tunggu ini tidak pasti, kadang hingga berbulan-bulan mereka harus menunggu. Hal yang sama juga terjadi di Batam.

Para pendatang pencari kerja ke negeri tetangga ini sebagian besar berasal dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terutama dari daerah-daerah minus, daerah-daerah pertanian yang sudah sangat jenuh, atau daerah-daerah nelayan. Pada awal tahun 80-an, para pencari kerja ke negara tetangga ini sebagian besar laki-laki.

Pada waktu itu, baik Malaysia maupun Singapura yang sedang giat membangun memang membutuhkan pasokan tenaga kerja yang besar untuk berbagai proyek konstruksi. Selain itu, Malaysia juga memiliki banyak perkebunan yang membutuhkan buruh-buruh kasar. Dua sektor pekerjaan inilah yang menampung sebagian besar tenaga kerja laki-laki dari Indonesia.

Di awal tahun 90-an, gelombang pencari kerja ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia, tidak lagi hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki, tetapi juga perempuan. Bahkan, hingga saat ini jumlah pencari kerja perempuan justru lebih banyak daripada laki-laki. Mereka biasanya bekerja di sektor rumah tangga, menjadi pembantu rumah tangga, baby sitter, atau penjaga orang jompo. Para calon tenaga kerja ini kemudian dikirim oleh perusahaan penyalur untuk mendapatkan kursus kilat yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Sambil menunggu proses administrasi pembuatan paspor dan permit mereka menghabiskan waktu di penampungan.

“...saya sudah tiga bulan di penampungan. Dulu waktu di kampung, sponsor (perantara, pen.) bilang paling lama hanya dua minggu menunggu surat-surat, setelah itu akan langsung di berangkatkan ke Singapura. Di sini saya dengan teman-teman (ada sekitar 20 orang) setiap hari ya cuma menganggur. Paling kalau pas dapat jatah piket pekerjaan rumah untuk belanja, masak, mencuci pakaian keluarga Bapak (sebutan untuk pemilik perusahaan penyalur), dan bersih-bersih rumah, barulah kami bekerja. Kadang suntuk juga. Soalnya kami kan nggak bisa bebas keluar dari penampungan. Jadi, paling-paling ya hanya baring-baring di lantai (mereka tidur di lantai yang dilapisi karpet tipis, tanpa kasur dan bantal). Baca-baca majalah kalau ada, atau nulis surat ke keluarga di Jawa” (Eti, 22 tahun).

Perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri ini biasanya memakai ruko-ruko sebagai tempat penampungan tenaga kerjanya. Di bangunan berlantai dua atau tiga ini, lantai bawah untuk kantor dan lantai atas sebagai penampungan, berjubel perempuan-perempuan yang menunggu untuk diberangkatkan. Dari penuturan beberapa canaker, dari kampung asalnya mereka dijanjikan akan paling lama dua minggu sampai satu bulan. Itupun katanya untuk mengurus surat-surat seperti paspor dan permit.

Tidak jarang di antara calon tenaga kerja ada yang menjadi depresi berat karena tidak segera diberangkatkan. Kisah-kisah calon tenaga kerja yang melarikan diri dari penampungan menjadi berita sehari-hari di tahun 90-an akhir. Biasanya mereka yang melarikan diri ini karena sudah tidak tahan tinggal lama-lama di penampungan tanpa kejelasan kapan akan diberangkatkan. Sementara, saat mereka minta dipulangkan, pihak perusahaan justru meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan, termasuk di dalamnya biaya hidup selama tinggal di penampungan, biaya transportasi, dan sponsor (perantara, orang yang membawa calon tenaga kerja dari kampung ke Tanjungpinang). Pada tahun 1998-2000 untuk setiap calon tenaga kerja yang dibawa, pihak perusahaan akan mengganti sponsor sebesar Rp. 500.000,- di luar penggantian biaya transportasi. Padahal dari kampungnya, calon tenaga kerja biasanya telah menyerahkan antara Rp. 750.000,- hingga Rp. 1,5 juta kepada sponsor yang katanya dipakai untuk biaya transportasi ke Tanjungpinang dan biaya pengurusan surat-surat.

Sementara pihak perusahaan penyalur pun mengalami kesulitan karena pihak penerima tenaga kerja di Singapura, terutama, mulai memperketat aturan, seperti canaker harus memiliki ijazah SMA, harus sudah siap kerja, punya kemampuan berbahasa Inggris mekipun pasif, dan berusia di bawah 30 tahun. Sedangkan canaker yang didatangkan dari Jawa sebagian besar hanya berpendidikan SD atau SMP. Mengenai keterampilan dan kesiapan kerja, meski sudah menghabiskan waktu dua minggu dalam pelatihan, kadang-kadang banyak canaker yang ternyata tidak bisa bekerja sesuai yang diharapkan majikannya. Akibatnya, hanya dalam hitungan minggu atau bulan mereka di kembalikan ke penyalurnya. Tidak jarang juga mereka telah menjadi korban kekerasan fisik para majikan yang tidak sabar dengan cara kerja yang dianggap tidak

bagus. Oleh karena itu, pihak perusahaan pun benar-benar menyeleksi calon tenaga kerja yang akan dikirim. Di antara belasan orang yang ada, seringkali hanya beberapa orang yang memenuhi kualifikasi, itu pun masih harus menunggu apakah pihak konsumen di Singapura akan menerima atau akan mengembalikannya dalam hitungan minggu. Bagi pihak penyalur, proses pengiriman tenaga kerja ini memang seperti judi. Bila konsumen merasa puas dan mengontrak calon tenaga kerja dengan penuh selama dua tahun, berarti pihak penyalur bisa merasa lega karena mereka akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, bila pihak konsumen tidak puas, masa calon tenaga kerja harus ditarik lagi ke Tanjungpinang, dan ini berarti kerugian besar dalam biaya operasional.

Untuk pasar tenaga kerja Malaysia, aturan agak lebih longgar. Mereka masih mau menerima canaker yang berusia di atas 30 tahun. Tetapi ketika memasuki tahun 2000, baik Singapura maupun Malaysia, mulai sulit dimasuki tenaga kerja dari Indonesia. Tetapi, arus canaker dari Jawa, terutama, tetap saja tidak menurun. Tak ayal, terjadilah penumpukan calon tenaga kerja di kota-kota transit seperti Tanjungpinang.

Bagi calon tenaga kerja, situasi yang mereka hadapi menjadi serba membingungkan. Tinggal lebih lama di penampungan tanpa ketidakjelasan jelas tidak mungkin, mau pulang tidak punya uang untuk membayar ganti rugi. Akhirnya, jalan “minggat” pun dipilih. Namun, meskipun sudah berhasil melarikan diri pun mereka masih harus menghadapi masalah baru, yaitu karena mereka kadang tidak punya uang sama sekali. Masa-masa inilah yang nantinya sangat menentukan masa depan mereka.

Di pelarian, mereka harus memikirkan untuk mendapatkan ongkos pulang. Berarti mereka harus mencari pekerjaan. Ada kecenderungan mereka memanfaatkan peluang kerja apa saja, karena keinginan untuk cepat mendapatkan uang. Jenis pekerjaannya pun beragam dari pekerjaan rumah tangga (pembantu rumah tangga), pelayan toko, pelayan kedai kopi, atau pramuria di tempat-tempat hiburan. Masa-masa ini sangat rawan buat mereka dan seringkali menjadi awal mereka terjun dalam prostitusi. Di dorong oleh rasa “malu” untuk pulang dengan kegagalan, sektor pekerjaan “remang-remang” memberikan alternatif lain untuk bisa mengubah kegagalan menjadi

kisah sukses yang bisa dibawa pulang dengan kebanggaan.

Bagi para calon tenaga kerja, mencari pekerjaan dengan penghasilan lumayan hanya berbekal ijazah SMP atau SMA nyaris mustahil, sehingga prostitusi sering dianggap sebagai pilihan yang paling rasional untuk mendapatkan uang dengan cepat.

“saya datang ke Tanjungpinang untuk bekerja di Singapura. Tapi setelah 6 bulan tidak juga diberangkatkan oleh pihak PT (perusahaan penyalur, pen.), say akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Bersama dengan dua orang teman, saya melompat dari lantai tiga ruko penampungan kami dengan memakai tali yang dibuat dari potongan seprai. Setelah itu, saya dan kedua teman sempat bingung mau kemana. Kami pun bertanya pada seorang tukang ojek. Dialah yang kemudian mencarikan kami pekerjaan di sebuah akau, untuk menjadi pelayan. Dari sinilah saya kemudian kenal seorang laki-laki yang mengajak saya untuk kerja di tempat lain, menjadi sales bir. Karena uangnya lebih lumayan, saya mau aja. Dari sini saya mulai dapat “sambilan” (menjadi PSK, pen.). Pikir-pikir udah tanggung ah, nyebur aja sekalian. Tapi saya pilih-pilih, saya hanya mau melayani orang Singapura atau Malaysia. Soalnya mereka nggak pelit” (Emi, 23 tahun)

4.1.2 Pasar Lokal Barang Impor

Letaknya yang dekat dengan negara tetangga dan jalur perdagangan internasional membuat kawasan Kepulauan Riau menjadi sangat terbuka terhadap arus barang dari luar negeri. Bahkan, dengan status istimewanya Batam telah menjadi pasar bagi barang-barang impor tanpa tanpa bea masuk. Begitu juga dengan Tanjungpinang, meskipun sebagian besar barang impor masuk melewati jalur ilegal dengan diselundupkan oleh para smokkel, penduduk kota bisa dengan bebas menikmati barang-barang impor dengan harga murah.

Sejak tahun 70-an, tepatnya sejak ada kapal penumpang yang transit di Tanjungpinang dari Jakarta menuju Belawan (Sumatera Utara), Tanjungpinang telah dikenal sebagai pasar barang impor berharga murah (Rohana, 2002). Banyak penumpang kapal yang memanfaatkan waktu transit untuk berbelanja di kota ini. Pada waktu itu pusat

perdagangan yang ada di Jalan Merdeka belum seramai sekarang, tetapi berbagai produk merk terkenal dunia dengan mudah dapat ditemui di kawasan ini.

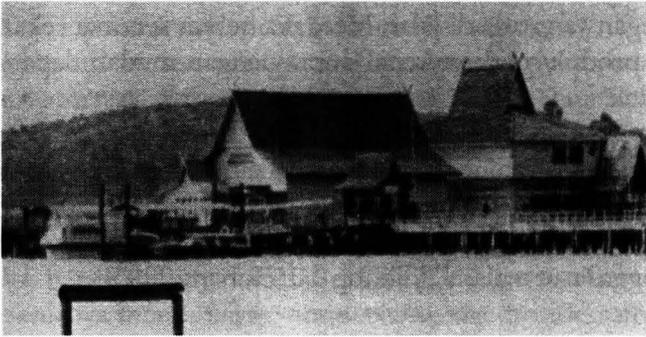
“...tahun 70-an Tanjungpinang mulai ramai lagi. Banyak kapal-kapal sing yang transit di Tanjungpinang. Bila malam tiba, para pelaut pun turun ke kota, sehingga suasana malam hari cukup semarak. Akau-akau ramai hingga larut malam” (dikutip dari Rohana 2003).

Tahun 70-an adalah masa ketika Tanjungpinang menjadi pelabuhan transit bagi kapal-kapal kargo dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, di tahun 1973-1974 terjadi kenaikan jumlah pelayaran hingga 100% (Wijaya 1999). Selain kapal kargo, Tanjungpinang juga menjadi pelabuhan transit kapal penumpang dari Belawan (Sumatera Utara) ke Tanjungpriok (Jakarta). Dari sinilah orang luar melihat Tanjungpinang sebagai tempat belanja barang impor berharga murah.

Ketika Batam mulai berkembang dengan status istimewa sebagai zona perdagangan bebas berikat, pasar barang impor murah yang dulunya di Tanjungpinang pun beralih ke kota ini. Bahkan, Batam dianggap sebagai “Singapura Kecil”.

Pada tahun 70-an, muncul trend di kalangan atas di Jawa untuk berbelanja ke Singapura. Dengan perkembangan Batam, muncul trend baru pada tahun 90-an di kalangan menengah di Jawa untuk berbelanja ke Batam. Saat Singapura “jauh dari jangkauan” Batam pun jadi pilihan. Terutama bagi para pelancong dari kawasan sekitar seperti dari kawasan Kepulauan Riau sendiri dan Riau Daratan.

Bagi para penduduk kawasan Kepulauan Riau, Singapura dan Malaysia bukan lagi tempat asing buat mereka. Menurut penuturan (Tini, 50 tahun), sebelum pecah krisis moneter tahun 1997, banyak orang Tanjungpinang yang pergi berbelanja ke Singapura atau Malaysia setiap akan datang hari besar. Waktu itu perbedaan kurs belum setajam sekarang.



Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang: Pintu Gerbang Transportasi Laut Antar Pulau dan Antar Negara

Sekarang ini animo orang untuk berbelanja ke Singapura memang jauh berkurang dibanding dulu, namun dalam beberapa tahun terakhir ini animo masyarakat untuk berbelanja ke Malaysia justru semakin meningkat. Hal ini karena perbedaan kurs rupiah terhadap ringgit tidak begitu menyolok seperti terhadap dollar Singapura dan karena perkembangan perdagangan Malaysia pun sudah sangat pesat. Bahkan, muncul trend baru di kalangan masyarakat Tanjungpinang, tidak hanya untuk berbelanja saja, tetapi juga untuk berobat ke negara jiran yang memiliki bahasa serumpun ini. Konon, ilmu kedokteran di negara yang start perkembangannya jauh di belakang kita ini sudah jauh lebih maju. Apalagi dengan maraknya isu malpraktek, salah diagnosa dan penanganan, membuat banyak orang kehilangan kepercayaan pada dokter-dokter dan rumah sakit-rumah sakit di dalam negeri.

“...dokter di Tanjungpinang mengatkan saya menderita kelainan jantung dan harus segera dioperasi. Lalu saya dirujuk di rumah sakit jantung di Jakarta. Setelah menjalani operasi dan berobat jalan selama berbulan-bulan kondisi saya bukannya membaik, malah semakin buruk. Akhirnya, atas saran seorang kerabat saya pun berobat ke Malaka. Menurut tim dokter di sana, kondisi saya justru memburuk karena obat-obatan yang saya minum. Singkatnya, obat yang seharusnya bisa memulihkan saya malah justru memperburuk kondisi saya” (Reva, 36 tahun).

Selain itu, pertimbangan ekonomi juga sangat berpengaruh. Bagi orang Tanjungpinang, berobat di sumah sakit di Malaka, Malaysia, dianggap jauh lebih murah karena menghemat ongkos perjalanan daripada harus ke Jakarta.

Terbukanya pintu terhadap arus lintas-batas ini memang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat di kawasan Kepulauan Riau. Begitu pula dengan pola konsumsi yang telah terbentuk sedemikian rupa yang nyaris tidak dapat berbeda dengan masyarakat negara tetangga. Sebagian besar barang-barang konsumsi sehari-hari yang beredar di pasar merupakan barang-barang impor. Akibatnya, begitu ada kebijakan baru yang mengubah tatanan ini, masyarakat pun menjadi resah. Seperti ketika pada tahun 2000 muncul isu adanya penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) di Batam sempat meresahkan masyarakat (Sijori Pos, 2000). Penerapan PPN ini mengakibatkan naiknya biaya hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh banyak barang kebutuhan sehari-hari masyarakat yang merupakan barang impor seperti beras, susu, serta berbagai makanan dan minuman kemasan. Selama ini masyarakat memilih barang impor karena kualitasnya bagus.

“Dampak pemberlakuan PPN ini juga menimpa para pekerja perusahaan asing yang memilih untuk mengurangi tenaga kerjanya karena harus membayar PPN. Bahkan, banyak perusahaan yang memakai cara kontrak jangka pendek, sehingga bila perusahaan bisa mem-PHK pekerja yang habis kontrak bila diperlukan. Sistem ini menguntungkan perusahaan karena mereka terbebas dari pembayaran pesangon” (Sijori Pos, 7 April 2000).

Di kalangan pedagang pemberlakuan PPN dapat mengakibatkan perdagangan menjadi lesu karena meningkatkan harga yang sangat tinggi (PPN sebesar 10 persen ditambah bea masuk). Yang jelas, pemberlakuan PPN ini membuat predikat Batam sebagai kawasan berikat menjadi tidak ada bedanya lagi dengan daerah lain. Sejak pemberlakuan status bonded-area, Batam dikenal sebagai kawasan belanja barang impor berharga murah. Lalu-lintas barang dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand berlangsung

dengan bebas. Pemberlakuan ketentuan ini tentu saja “menggoyang” keamanan yang sudah terbentuk, pola konsumsi maupun gaya hidup.

Meskipun demikian, keresahan ini tidak berlangsung lama. Terbukti ketika waktu realisasi sudah dekat orang sudah tidak begitu peduli lagi. Tampaknya, berbagai strategi adaptasi telah dilakukan. Ketentuan untuk harus menyertakan kartu garansi bagi setiap barang elektronik misalnya, meski memang diikuti toh lebih banyak juga akal-akalannya. Lagi pula profesi smokkel yang sudah ada sejak zaman Belanda berkuasa pun sudah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dapat dikatakan meski tatanan hukum formal untuk arus lintas-batas barang dan orang semakin diperketat, selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan.

4.2 Metropolitan Baru di Perbatasan

Persentuhan dengan ekonomi dan budaya global telah menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah pertemuan antara lokal dan global. Hal ini ditandai dengan hadirnya kota-kota di perbatasan sebagai kota-kota metropolitan yang digerakkan oleh kekuatan ekonomi global dan secara berangsur-angsur menjadi agen budaya global di tingkat lokal.

Untuk kasus Kepulauan Riau, Batam dan Tanjungpinang merupakan contoh metropolitan baru yang muncul di era Kerjasama Sijori, sebagai sebuah kerangka pertumbuhan ekonomi global. Bab ini akan membahas mengenai kedua kota ini sebagai metropolitan di perbatasan.

4.2.1 Lahan Industri Multinasional

Pada tahun 1978, BJ Habibie (kala itu Menteri Riset dan Teknologi) mengemukakan “teori balon” dalam pengembangan Batam. Tujuannya untuk menyerap pembangunan di Singapura dan menciptakan persekutuan dengan daerah sekitarnya. Secara geografis, jarak Batam dan Singapura hanya 20 kilometer laut, sama-sama strategis. Keduanya sama-sama terletak di Selat Malaka, jalur lalu lintas niaga yang paling ramai di dunia. Perbedaan antara keduanya adalah Singapura telah jauh lebih maju dan lebih mapan dibandingkan Batam. Pembangunan kota yang telah berjalan 200 tahun telah menjadikan kota ini sebagai

pusat perdagangan internasional. Cadangan devisanya di akhir tahun 90-an saja telah mendekati angka US\$ 100 milyar (Lindquist, 2000).



Batam: Pulau Industri dan Perdagangan
(repro Profil Batam 2005)

Batam direncanakan akan menjadi pusat produksi serba canggih dengan gaya hidup serba kaya, serta tingkat kesehatan, pendidikan, keselamatan dan mutu lingkungan yang mutakhir (Kompas, 2001). Pendek kata, Batam akan menjadi salah satu tempat penting dalam jaringan teknologi, produksi, perdagangan, serta keuangan dunia.

Beberapa dekade kemudian, Batam yang semula hanya dihuni sekitar 6.000 jiwa pada tahun 2000 telah berkembang menjadi pulau industri yang dihuni sekitar 460.000 jiwa. Kerjasama Sijori yang direalisasikan pada tahun 90-an telah menjadikan pulau ini sebagai lahan industri yang menyediakan banyak lapangan pekerja. Hasilnya, banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesiaterutama Jawa yang sangat padat penduduknya tetapi lapangan pekerjaan sempitmembanjiri pulau ini. Terlebih ketika pecah krisis moneter di tahun 1997. Batam kemudian menjadi “tumpuan harapan” para pencari kerja.



Potret Pekerja Industri di Batam
(repro Profil Batam 2005)

“...Ketika terjadi krisis moneter, saya di-PHK dari pabrik tempat kerja saya di Jakarta. Saya kemudian pulang kampung ke Jawa Tengah. Di kampung, rupanya banyak teman saya yang mengalami nasib serupa. Lalu atas ajakan seorang teman yang telah bekerja di Batam, saya dan beberapa teman mengikuti teman tadi, pergi ke Batam. Memang saya sering mendengar bahwa bekerja di Batam itu menyenangkan, gajinya besar. Saya lihat teman saya itupun telah berhasil. Setiap bulan ia bisa mengirim uang untuk keluarganya di kampung” (Gino, 32 tahun).

Sebagai kota yang terus berkembang, Batam tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan di sektor industri menengah dan besaryang memang menjadi prioritastetapi juga pada sektor pendukung (informal) seperti perdagangan kecil dan jasa. Pada tahun 2001, Batam memiliki 14 kawasan industri yang mempekerjakan sebanyak 155.591 tenaga kerja domestik dan 1.692 tenaga kerja asing (Kompas, 22 Maret 2001). Ke-14 kawasan industri ini menyerap sedikitnya 415 perusahaan modal asing yang 70 persen merupakan industri komponen dan perakitan elektronik.

Batamindo Industrial Estate merupakan contoh sukses pusat industri yang memainkan peran penting dalam ekonomi Batam. Pusat industri ini dibuka pada tahun 1990, sebagai realisasi Kerjasama Sijori. Pemerintah Singapura melalui Jurong Environmental Engineering dan

Singapore Technologies Industrial Corporations menginvestasikan dana sebesar US\$ 350 juta, bekerja sama dengan Salim Group. Dengan memakai lahan seluas 320 ha, di lokasi ini terdapat lebih dari 100 pabrik.

Batamindo menyediakan tiga tipe pabrik siap pakai dan siap beroperasi untuk berbagai perusahaan dengan tipe produksi yang berbeda. Investor, dengan demikian hanya menyewa tempat dan tidak lagi dibebani dengan investasi pembangunan infrastruktur. Kondisi ini merupakan strategi untuk menarik investor asing untuk menjadikan Batam sebagai lokasi industrinya.

Pada tahun 1998, lebih dari setengah perusahaan yang beroperasi di Batamindo adalah milik Jepang. Secara keseluruhan, pada tahun yang sama, Batamindo menampung sekitar 53.000 pekerja. Dari jumlah itu sebanyak 32.000 tinggal di dorm yang disediakan perusahaan di lokasi yang sama, sedangkan sejumlah 20.000 tinggal di luar, sebagian besar tinggal di kompleks ruli terdekat dengan lokasi kerja mereka.

“...waktu baru bekerja saya tinggal di dorm, tapi setelah menikah saya tinggal di ruli yang tidak jauh dari pabrik tempat saya bekerja. Saya dan suami membeli ruli ini seharga 6 juta (berupa rumah semi permanen dengan lantai semen yang berukuran sekitar 5x6 meter², terdiri dari dua kamar tidur kecil berukuran 2x3 meter, satu ruang tamu, dan dapur)” (Umi, 35 tahun).

Dari ratusan industri yang ada di Batam, sebagian besar (hampir 80%) lebih membutuhkan tenaga kerja perempuan. Linquist (2000) menyebutnya dengan proses feminisasi tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh sebgaaian besar indutri yang ada memang tidak memerlukan tenaga fisik yang kuat, tetapi lebih memerlukan tenaga ketelitian dan ketelatenan. Tenaga kerja perempuan dianggap memiliki kelebihan yang dibutuhkan itu, dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Alasan lainnya, tenaga kerja perempuan relatif lebih mudah diatur. Mereka cenderung tidak banyak protes meskipun upah yang diterima dan beban kerjanya tidak sesuai. Pengaruh kultural sangat berpengaruh di sini, karena biasanya perempuan bekerja bukan untuk men-support ekonomi keluarga, seperti halnya laki-laki, tetapi lebih pada untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Feminisasi tenaga kerja ini berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di kalangan laki-laki di Batam. Seperti dituturkan oleh Sugi (27 tahun):

“...susah hidup di Batam ini, apalagi untuk laki-laki. Tidak banyak pekerjaan di pabrik yang bisa diperoleh. Kalaupun bisa bekerja di pabrik kita harus melalui 'orang dalam' dan belum tentu juga menghasilkan banyak uang, apalagi untuk lulusan SMA, karena pekerjaan yang ada untuk laki-laki hanyalah pekerjaan remeh seperti tukang angkat barang, satpam, atau penjaga gudang. Bila ingin tetap bertahan hidup di Batam, ya harus pintar-pintar cari 'peluang' lain”

Dalam beberapa tahun terakhir, kesempatan kerja di Batam mulai jauh berkurang, meskipun pabrik-pabrik baru telah banyak berdiri. Sugi mengatakan bahwa memasuki tahun 2000-an, peluang kerja di Batam semakin sempit, tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan.

“...sekarang ini, bisa mendapatkan pekerjaan untuk 6 bulan saja sudah syukur banget. Meskipun pekerjaannya sangat tidak menyenangkan. Saat kita bekerja pun kita sudah harus mulai memutar otak untuk mencari peluang lain. Bila tidak, saat kontrak berakhir bisa-bisa kita hanya jadi pengangguran. Hidup rasanya menjadi tidak pernah tenang, selalu dilanda kekhawatiran.”

Tahun-tahun terakhir ini, sebagai dampak krisis moneter yang belum juga pulih, banyak perusahaan yang tidak lagi memakai kontrak jangka panjang untuk para tenaga kerjanya. Rata-rata perusahaan sekarang hanya memakai kontrak 6 bulan. Ini untuk menghindari kerugian dalam proses produksi karena fluktuasi permintaan pasar. Akibatnya, tingkat persaingan pun semakin tinggi. Orang kemudian dihadapkan pada realita yang mengharuskan mereka untuk jeli menangkap peluang.

“...sekarang ini untuk menjadi buruh pabrik minimal harus punya ijazah SLTA. Sedangkan untuk menjadi supervisor minimal berijazah akademi.

Sementara aku hanya lulusan SD. Kalau diikuti aturannya aku tidak akan bisa bekerja di mana-mana. Lalu aku akalin ijazahku. Ijazah kawan aku fotokopi, lalu foto dan namanya aku ganti punyaku, lalu aku fotokopi lagi biar tampak rapi. Dengan begitu aku bisa masuk. Malah aku sempat jadi supervisor dengan akal-akal-an yang sama. Aku fotokopi ijazah kawan yang lulusan akademi. Sempat juga bekerja di bagian komputer. Padahal aku buta komputer sama sekali. Gara-garanya, waktu masukin lamaran aku main akal-akalan yang sama ternyata ijazahnya sekolah komputer. Jadilah aku ditempatkan di bagian komputer” (Anto, 30 tahun).

Pada tahun 2000 jumlah pelamar rata-rata hanya 40 orang per hari. Pada tahun 2001 jumlahnya meningkat menjadi 90 orang per hari. Pertumbuhan tenaga kerja dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan yang fantastis. Data Otorita Batam memperlihatkan jumlah tenaga kerja yang pada tahun 1986 hanya sebanyak 6.764 orang, meningkat menjadi 16.085 pada tahun 1990, dan pada tahun 2000 telah mencapai 155.591 orang.

“...setiap tenaga kerja di Batam pulang ke kampungnya, kembali ke Batam minimal membawa satu atau dua orang pencari kerja. Belum termasuk yang datang ke Batam sendiri-sendiri.” (Kompas, 11 Juni 2001)

Banyak di antara pendatang yang harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan pekerjaan dan terpaksa tinggal di ruli yang sewanya terjangkau. Diperkirakan dari 400 orang pelamar hanya belasan orang yang diterima. Sedangkan yang tidak diterima harus menunggu berbulan-bulan dengan terus mencoba melamar ke pabrik-pabrik yang ada. Kadang uang bekal yang dibawa dari kampung pun habis dan terpaksa bekerja 'apa saja' untuk tetap bertahan, sebab untuk kembali ke kampung 'malu.'

“...sudah 15 tahun saya merantau. Belum sekalipun pulang kampung. Kalau mengirim uang ke orang tua masih rutin. Soalnya pulang kampung dalam kondisi seperti ini malu. Maupunya, pulang kampung kita sudah berhasil” (Anto)

Sementara itu, di Pulau Bintan, dengan pusat kotanya

Tanjungpinang, pun mulai tumbuh menjadi kota yang ramai. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau. Namun, perkembangan penting di pulau terbesar di Kepulauan Riau ini adalah dua kawasan kerjasama multinasional, Lagoi dan Lobam. Keduanya terletak di kawasan Bintan Timur, yang sekarang berada di wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Riau.

Kedua kawasan kerjasama tersebut, baik Lobam maupun Lagoi, telah membuka peluang kerja cukup besar bagi penduduk Bintan dan para pendatang. Kedua tempat ini mendatangkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi Pemda Kabupaten Kepulauan Riau (Sijori Pos, 13 Januari 2000).

Kawasan wisata terpadu Lagoi membuka peluang kerja sebesar 90 persen untuk pekerja lokal, 9-10 persen pekerja dari luar daerah, dan hanya 1 persen tenaga asing, khusus orang Singapura (Republika, 1996). Sampai tahun 2000 kawasan ini telah menyerap sebanyak 30.000 orang tenaga kerja. Sekarang ini terdapat 5.000 orang yang bekerja dalam konstruksi dan 2.500 orang di perhotelan.

Sementara, Lobam yang dikembangkan sebagai Bintan Industrial Estate, dibangun sebagai kawasan industri menengah tekstil, garmen, elektronik, pengolahan kayu, komponen baja, dan makanan. Industri ini ditujukan sebagai industri padat karya yang dapat menampung sekitar 10.000 pekerja di semua sektor.



Kawasan Berikat Lobam

Seperti halnya Batam, Pulau Bintan beberapa tahun terakhir ini juga menghadapi masalah sehubungan dengan menyempitnya kesempatan kerja di sektor formal. Tanjungpinang sebagai kota utama memang tidak memiliki lapangan kerja cukup banyak, kecuali beberapa industri kecil dan menengah. Lobam dan Lagoi pun tidak lagi memberikan peluang kerja yang memadai.

Perkembangan industri di kedua kota ini memang telah mengalami titik jenuh, dalam hal peluang kerja yang dapat ditawarkan pada para pencari kerja. Kondisi inilah yang justru menjadi kondisi yang 'menyuburkan' sektor ekonomi informal, yang justru dapat menjadi peluang untuk menangkap kesempatan yang ditawarkan dalam perkembangan ekonomi kota, sebagai dampak lain dari persentuhan dengan ekonomi global. Pembahasan mengenai perkembangan sektor informal yang pada gilirannya nanti erat kaitannya dengan perkembangan gaya hidup akan dibahas di subbab berikut.

4.2.2 Pusat Konsumsi: Leisure dan Gaya Hidup

Seperti telah disinggung di atas, perkembangan sektor pekerjaan formal, dalam hal ini industri, yang mengalami kejenuhan akhirnya menjadi pemicu berkembangnya sektor informal. Sektor informal ini merupakan sektor bayangan yang menangkap peluang dari perkembangan ekonomi terencana. Sektor informal yang sebagian besar mengandalkan komoditas jasa menemukan tempatnya dalam masyarakat kota yang kian hari semakin tidak memiliki waktu untuk mengurus remeh-temeh pekerjaan karena waktunya tersita oleh pekerjaan utamanya. Di samping itu, sektor ini juga merambah bisnis hiburan yang telah menjadi suatu kebutuhan kaum urban.



Mall: Pusat Konsumsi dan Gaya Hidup
(repro Profil Batam 2005)

Ketika ekonomi kota mulai berkembang, Sektor informal seperti perdagangan kaki lima dan sektor jasa seperti supir, pembantu rumah tangga, pelayan toko, pramuria, dan sebagainya mengalami perkembangan cukup pesat di tahun-tahun terakhir ini. Sektor informal ini ternyata memiliki omset yang tidak kalah fantastisnya dibandingkan dengan sektor formal.

Pedagang Kaki Lima di Batam

Menurut hasil pantauan Kompas (7 September 1999) di Batam, tidak kurang dari milyaran dana segar yang beredar setiap bulannya dari kalangan pedagang kaki lima saja. Lokasi pedagang kaki lima yang ada di 500 titik rata-rata sehari memiliki omset Rp. 100.000,- sehingga dalam sebulan mencapai Rp 1,5 milyar. Bahkan, dalam pantauan Kompas tersebut, seorang ibu penjual rokok dengan gerobak dorong kecil beromset 5-6 juta rupiah sebulannya.

Beberapa informan yang akhirnya lebih memilih untuk bekerja di sektor informal mengatakan bahwa, pekerjaan di luar pabrik ini justru lebih dapat memberikan ketenangan. Hanya saja, memang butuh modal awal yang cukup besar, satu hal yang menjadi masalah bagi banyak orang. Bagi mereka yang bekerja di sektor industri dengan gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mengumpulkan modal atau

menabung hanya menjadi impian yang sulit diwujudkan. Terlebih bagi sebagian besar pekerja pendatang masih terikat “kewajiban” untuk mengirim uang ke kampung halaman. Akhirnya, pilihan orang untuk menjadikan pekerjaan sektor informal sebagai pendukung pun dipilih yang tidak banyak memerlukan modal, seperti ngojek atau menjadi sopir taksi.

Batam dan Bintan tidak hanya menjadi lokasi industri multinasional dengan nama besar, tidak juga hanya dikenal sebagai pusat kesenangan kaum jet-set untuk berlibur. Batam memiliki pusat kesenangan bertaraf internasional untuk kaum jet-set menghabiskan waktu dan dollar mereka, begitu juga Bintan dengan resor terpadunya Lagoi. Namun, di luar tempat-tempat eksklusif tersebut masih tersisa ruang yang bahkan lebih luas dan beragambagi wisatawan asing maupun domestik yang ingin mencari kesenangan dengan tarif terjangkau. Pendek kata, ada sejumlah tempat yang mewakili berbagai tingkatan daya beli. Jadi, untuk memperoleh kesenangan tinggal pilih tempat yang sesuai dengan isi dompet. Tempat-tempat kesenangan atau rekreasi di kedua pulau ini memiliki jenis yang hampir sama seperti lapangan golf, diskotik, karaoke, pub, bar, restoran, gamezone, dsb.

Tanjungpinang ketika masih menjadi bagian dari pemerintahan administratif Kabupaten Kepulauan Riau mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata dan hiburan (Sijori Pos, 13 Januari 2000). Sektor ini paling tidak menyumbangkan 2-3 milyar rupiah setiap tahunnya. Sumber PAD tertinggi disumbangkan oleh resor internasional Lagoi (Sijori Pos, 13 Januari 2000). PAD dari Lagoi melalui pajak pembangunan I (PB I) mencapai 40 milyar rupiah setahun (dari 5 hotel: Sedona, mana-mana, banyan Tree, dan Club Med). Kunjungan wisatawan manca ke Lagoi pada tahun 1999 mencapai 300 ribu orang, padahal ke Tanjungpinang hanya 150 ribu orang.

Lagoi yang diresmikan Presiden Suharto pada tanggal 18 Juni 1996 direncanakan akan menjadi kawasan wisata terpadu di dunia (Republika, 18 Juni 1996). Lahan seluas 23.000 ha dengan investasi 1,2 triliun. Kawasan ini terbagi menjadi resor wisata (12.000 ha) dan wilayah penyangga dan jalur hijau (12.000 ha). Di kawasan resor wisata ini akan dibangun 20 hotel (dengan jumlah kamar 16.000 kamar hotel), 27 villa, 9 kondominium, 13 padang golf, 18 kilometer pantai pasir putih, marina,

pusat kerajinan, perkampungan pekerja, terminal ferry, dan prasarana umum lainnya. Sedangkan di wilayah penyangga akan dibangun suaka alam dan satwa burung, rekreasi alam terbuka, dan taman safari.



Lapangan Golf di Lagoi

Kawasan resor internasional Lagoi yang menempati areal seluas 23.000 ha ini dibangun oleh PT Bintan Resort Corporation (BRC), sebuah kerjasama Indonesia-Singapura dengan komposisi 60:40. Dari pihak Indonesia sahamnya dimiliki oleh Salim Group (80%), Pemda Riau (12,5%), dan TNI AL (7,5%). Sedangkan pihak Singapura sahamnya dimiliki oleh Singapore Technology Industrial Corporation Ltd., DBS Bank Ltd., OCBC Bank Ltd., OUB Ltd., OUL Equity Investment Pte. Ltd., Straits Steam Ship Land Ltd., Tropical Resort Ltd., dan KMP Bincorp Investment Ltd. Total biaya pembangunannya menghabiskan S\$3,5 milyar.

Di luar sektor pariwisata formal, yang tidak kalah suburnya adalah perkembangan sektor informalnya yaitu industri prostitusi. Di Batam, meskipun hal ini menjadi noktah hitam bagi Dinas Pariwisata Batam, tidak bisa diingkari bahwa sektor ini pun cukup banyak memberi masukan dalam tingkat hunian hotel atau tempat-tempat hiburan. Hal yang sama juga terjadi di Tanjungpinang. Dilihat dari jumlah wisatawan negara tetangga, Singapura dan Malaysia, yang masuk ke Batam maupun Tanjungpinang di akhir minggu, nyaris bisa dipastikan sebagian besar memang datang hanya untuk seks.

Berdasarkan informasi dari Yayasan Peduli AIDS Tanjungpinang (wawancara dengan salah satu pengurusnya) tahun 2002, di Tanjungpinang diperkirakan terdapat sekitar 3.000 perempuan yang berkerja dalam bisnis prostitusi ini. Angka ini diambil dari lokalisasi-lokalisasi resmi, belum termasuk mereka yang bekerja free-lance. Peningkatan ini terjadi tidak hanya karena meningkatnya “permintaan” pasar asing, tetapi juga peningkatan “permintaan” pasar lokal. Sementara, di Batam saat ini diperkirakan terdapat sekitar 5.000 pekerja seks komersial, juga perkiraan kasar, karena banyak prostitusi terselubung yang nyaris susah untuk dideteksi. Dalam setiap tempat hiburan, kelas bawah hingga atas, yang murahan atau yang eksklusif, nyaris selalu ada aktivitas prostitusi. Belum lagi yang menjajakan diri di jalanan dengan tarif dari 20 ribu sampai 50 ribu untuk short-time hampir tidak terhitung lagi. Bisnis prostitusi terselubung ini juga dapat ditemui di lokasi-lokasi tertentu seperti salon-salon “khusus”, caffée, tempat pijat, akau, hotel, diskotik, fitness center, dan karaoke.

“...hampir dapat dipastikan bahwa di setiap tempat hiburan malam di Tanjungpinang, baik diskotik atau karaoke, sering menjadi tempat transaksi prostitusi. Banyak pramuria tempat-tempat hiburan ini yang memiliki 'pekerjaan sampingan' sebagai lontong (istilah lokal untuk menyebut perempuan pekerja seks komersial)” (Edi, 30 tahun).

Sedangkan prostitusi yang dianggap 'legal' atau 'formal,' karena berada dalam pengawasan pemerintah, berada di lokalisasi-lokalisasi (di Batu 15 dan Batu 24). Di sini terdapat ratusan perempuan pekerja seks komersial yang tinggal di rumah-rumah yang dikelola oleh mami-mami (istilah lokal untuk germo).

Tidak sepenuhnya salah bila akhirnya justru industri ini menjadi 'primadona' di Kepulauan Riau. Ini dapat dilihat dari tingginya tingkat hunian hotel-hotel di kawasan ini setiap akhir pekan. Untuk Tanjungpinang, kecil sekali kemungkinan untuk mengatakan bahwa naiknya kunjungan wisatawan manca negara tiap akhir pekan ini adalah untuk wisata reguler, sekedar jalan-jalan, atau menikmati situs sejarah Penyengat. Begitu pula dengan Batam. Kedua pulau ini nyaris tidak memiliki daya tarik pariwisata lain kecuali wisata hiburan dan seks.

Meskipun Tanjungpinang telah menyatakan diri sebagai daerah tujuan wisata budaya dan sejarah sejak tahun 1988 (Pemda Kotif Tanjungpinang, 1997). Fenomena ini juga terjadi di Tanjungbalai, Karimun, yang setiap ahir pekan 'diserbu' wisatawan dari Singapura untuk seks (Kompas, 11 Mei 2001).

BAB V

DILEMA LOKAL

Bagian ini adalah rangkuman dari perkembangan wilayah Kepulauan Riau era Kerjasama Sijori dan dampak yang dirasakan di tingkat lokal. Namun, bagian ini tidak akan membahas semua dampak yang muncul, melainkan hanya memilih beberapa topik yang dianggap paling 'kuat.'

Ada empat dampak yang akan dibahas, yaitu yang terkait dengan masalah kependudukan. Dalam bagian ini akan diangkat permasalahan mengenai fenomena ruli di Batam. Fenomena ini dianggap sebagai sebuah representasi dampak perkembangan Batam, contoh 'kekeliruan' atau kesalahan dalam kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dalam sebuah perencanaan. Kedua, mengangkat permasalahan Lobam dan Lagoi di Pulau Bintan. Kedua lokasi kerjasama multinasional ini merupakan contoh dari kebijakan pemerintah (daerah maupun pusat) yang seringkali tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Ketiga, mengenai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan pembangunan, serta adanya kepentingan dan ambisi untuk 'menjual' pulau kepada pasar asing tanpa peduli pada dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Keempat, mengenai dampak sosial. Bagian ini akan membahas mengenai perubahan sosial budaya yang terjadi karena persentuhan dengan ekonomi pasar global.

5.1 Ruli: Masalah Kependudukan di Kota Batam

Pada awal perkembangannya, di akhir tahun 70-an, Batam hanya dihuni sekitar 6.000 jiwa. Pada tahun 1995 angka ini meningkat menjadi 200.000 jiwa. Lima tahun berikutnya jumlahnya telah meningkat dua kali lipat. Daya tarik pulau ini telah memikat banyak pendatang dari luar daerah. Sebagian besar para pendatang ini bekerja di sektor industri besar dan menengah. Sebagian lainnya meraup peluang di sektor informal.

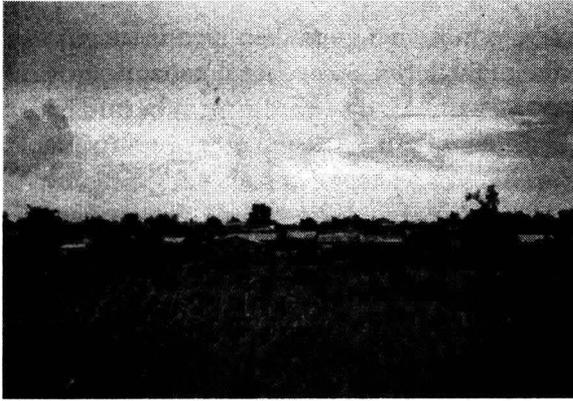
Meningkatnya pendatang dari tahun ke tahun ini menimbulkan masalah tersendiri bagi Batam (Kompas, 2001). Rumah liar (ruli) semakin banyak bermunculan di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan lokasi industri. Pada tahun 90-an jumlah ruli yang diperkirakan

sekitar 25.000 unit telah bertambah dua kali lipat di tahun 2000. Bahkan, terus bertambah setiap tahun. Keberadaan ruli-ruli ini sangat meresahkan karena tidak hanya mengganggu program pengembangan Batam atau mengancam kelestarian lingkungan, karena beberapa lokasi ruli merupakan wilayah penyangga seperti hutan lindung dan lokasi resapan air. Kondisi ini juga membuat investor merasa tidak “nyaman” dan “aman” bila menemukan banyak ruli di sekitar lokasi usahanya.

Pada tahun 2000 jumlah ruli di Batam diperkirakan telah sama banyak dengan jumlah pemukiman resmi. Tidak hanya itu, diperkirakan para pendatang baru membangun sebelas ruli setiap harinya. Dalam lima tahun ke depan bukan tidak mungkin jumlah ruli akan menjadi dua kali lipat pemukiman resmi kalau pihak Otorita Batam tidak cepat mengambil tindakan.

Ruli muncul di antara bangunan pusat-pusat kegiatan industri dan perdagangan tersebut. Kompleks pemukiman ini banyak dihuni oleh buruh-buruh pabrik dan bangunan, serta para pekerja sektor informal. Tanah-tanah kosong yang mereka tempati merupakan tanah milik pemerintah daerah atau pemilik modal yang belum tergarap. Pada mulanya, sebagian besar penghuni ruli adalah para pekerja dengan tingkat ekonomi rendah, namun lambat laun banyak juga pekerja menengah yang memilih tinggal di ruli. Alasannya praktis, karena kompleks-kompleks perumahan-perumahan murah seperti perumnas letaknya sangat jauh dari pusat kota. Dengan tinggal di ruli mereka bisa lebih menghemat ongkos. Lambat laun, ruli berkembang selayaknya pemukiman biasa. Rumah-rumahnya pun mulai banyak yang dibangun permanen. Mereka juga mengelola fasilitas pendukung seperti listrik dari genset yang dikelola bersama-sama.

Meskipun setiap saat menghadapi ancaman 'pembersihan' atau razia, tetapi orang-orang yang tinggal di sini dapat dikatakan tidak ambil peduli. Buat mereka, bila datang masanya dirazia, mereka bisa pindah ke tempat lain. Oleh karena itu, rumah-rumah pun tidak pernah dibangun secara permanen, sehingga setiap saat ada razia mereka tidak merasa terlalu rugi.



Sebuah Lokasi Ruli di Batam

Penertiban ruli di Batam telah dilakukan oleh pihak Otorita Batam pada tahun 1999, yaitu dengan memindahkan warga penghuni ruli ke perumahan sederhana tapi permanen (Kompas, 2001). Ismeth Abdullah (Kepala Otorita Batam waktu itu) mengatakan bahwa ruli merupakan wujud kelemahan perencanaan kawasan industri Batam. Dalam perencanaan kota, kawasan pemukiman khususnya pemukiman murah yang terjangkau oleh kemampuan pekerja menengah ke bawah seringkali letaknya sangat jauh dari lokasi industri. Sedangkan rumah-rumah sewa harganya sangat tinggi. Tarif sewa rumah sekarang ini untuk satu kamar minimal Rp 250.000,- Memang, ada beberapa sentra industri seperti Muka Kuning yang menyediakan pemukimandormbagi para pekerjanya, namun pemukiman-pemukiman tersebut tidak dapat menampung seluruh pekerja yang terlibat di dalamnya, terlebih yang sudah berkeluarga. Akibatnya, para pekerja kemudian memilih tinggal ruli di sekitar tempat kerjanya untuk menghemat biaya transportasi.

Memasuki tahun 2001, Pemerintah daerah Batam akan memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengendalian Penduduk. Salah satu poin inti dalam Perda tersebut adalah mengharuskan pendatang yang memasuki Batam harus memiliki kejelasan tujuan dan tempat tinggal. Bila tidak ada kejelasan pendatang tersebut tidak akan diijinkan masuk ke Batam. Perda ini menjadi senjata

ampuh Pemda untuk menghentikan pendirian rumah liar. Namun, ternyata Perda ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pendatang dari luar tetap saja banyak, ruli-ruli pun terus bermunculan.

Ruli-ruli terus bermunculan karena perumahan yang didirikan di area pusat kota hanyalah perumahan elit yang harganya tidak terjangkau oleh kelas pekerja menengah ke bawah. Sedangkan perumahan kelas menengah ke bawah (perumnas) selalu berada jauh dari pusat kota dan pusat kegiatan ekonomi.

Sebenarnya sejak tahun 1999 Batam telah menambah areal pemukiman seluas 4.000 ha dari 20.000 ha areal pemukiman resmi yang sudah ada (Kompas, 7 September 1999). Pertambahan ini untuk merelokasi pemukiman liar yang diperkirakan telah mencapai 45.000 unit. Proyek ini masuk dalam master plan pengembangan Batam untuk tahun 2000. Dalam rancangan pembangunan mendatang, proyek pembangunan industri akan disejajarkan dengan pemukiman berjarak antara 1 hingga 4 kilometer sehingga masyarakat tidak akan kesulitan transportasi seperti sekarang ini. Bahkan, seperti kawasan Industri Pelita akan ditata supaya selaras dan tidak merugikan penduduk. Selain itu, setiap kawasan industri diharuskan untuk menyiapkan pemukiman seperti kawasan Industri Muka Kuning. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, ruli-ruli masih tetap menjadi pengisi ruang-ruang kosong yang ada di antara pusat kegiatan ekonomi industri dan perdagangan.

5.2 Lobam dan Lagoi: “Nyanyi Sunyi di Keramaian”

“malang nian nasib orang-orang Lagoi dan Lobam. Sudahlah tanah mereka dirampas dengan ganti rugi yang sangat merugikan, kemudian mereka disergap oleh pasukan bersenjata, di kala mereka mencoba untuk menentukan kembali hak mereka.” (Sijori Pos, 23 Januari 2000)

Kawasan resor Lagoi memiliki luas 23.000 ha, sedangkan kawasan industri Lobam menempati lahan seluas 4.000 ha. Kedua kawasan ini dibangun di atas tanah milik penduduk setempat dengan ganti rugi yang dinilai sangat merugikan penduduk. Ketika kasus ini bergulir, banyak pihak mensinyalir adanya kolusi dari pihak Pemda dengan pengembang yaitu PT Buana Mega Wisata. Hal ini terungkap dengan adanya selisih pembayaran ganti rugi yang cukup besar antara

harga yang ditetapkan melalui SK Bupati dan dari pihak investor Singapura. Tidak hanya itu, yang menimbulkan rasa tidak puas penduduk adalah adanya janji-janji dari pengembang yang tidak ditepati.

Ketika lahan di kawasan Lagoi dan Lobam diambil-alih oleh PT Mega Buana Wisata penduduk hanya memperoleh ganti rugi 100-300 rupiah (SK Bupati nomor 75/V/1990 menentukan ganti rugi sebesar 50-70 rupiah). Padahal, pihak investor Singapura menyediakan dana sebesar S\$3 (kurs 1.300-1.500 rupiah, pen.) per meter persegi, begitu penjelasan yang diberikan Phillip Yeo, Ketua Badan Pengembangan Ekonomi (Economic Development Board) Singapura (Sijori Pos, 2000).

PT Buana Mega Wisata sebagai pihak pengembang juga menjanjikan akan menyediakan desa pemukiman baru, di mana setiap kepala keluarga (KK) akan memperoleh satu bangunan rumah permanen, tanah bersertifikat seluas 2000 meter persegi, jaringan jalan aspal, sumber air, serta fasilitas umum (sekolah dan tempat ibadah).

Sengketa tanah ini mengemuka ketika ada 11 KK yang menerima pembayaran ganti rugi hingga 4.000 rupiah per meter persegi yaitu mereka yang tinggal di Lagoi Blok A4 (Sijori Pos, 2000). Akibatnya, warga lainnya merasa tidak puas dan dirugikan. Namun, perjuangan untuk menuntut keadilan ini berjalan sangat a lot, dan akhirnya meredam begitu saja.

Pada awal tahun 2000 sebuah desa wisata dibuka di kawasan Bintan Utara. Banyak kalangan menganggap hal ini merupakan apology pihak berwenang untuk meredam konflik yang terjadi beberapa tahun terakhir seputar ganti rugi tanah di Lagoi. Meskipun, ditegaskan oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepulauan Riau bahwa pembukaan desa wisata ini adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat pedesaan Bintan Utara dengan menggalakkan industri kerajinan dan kesenian, serta untuk mendukung kawasan wisata internasional Lagoi. Dalam beberapa tahun kemudian, gaung kawasan desa wisata ini pun meredup dengan semakin menghilangnya kasus tuntutan ganti rugi.

Setelah melalui serangkaian aksi demo dan perusakan hingga awal tahun 2000-an, sekarang ini kawasan Lagoi sudah mulai beroperasi normal kembali. Hanya saja keamanan lebih diperketat. Bila sebelumnya orang bebas keluar masuk kawasan ini, meskipun hanya untuk jalan-jalan

dan menikmati keindahan penataan resor ini, sekarang setiap pengunjung harus melapor pada petugas jaga dengan meninggalkan kartu identitas. Di dalam lokasi pun, terutama di lingkungan hotel-hotel orang tidak bisa lagi leluasa keluar masuk, kecuali mereka memang menginap di hotel-hotel tersebut.

5.3 Menjual Tanah, Menuai Bencana: dampak lingkungan akibat industrialisasi (Batam) dan penambangan pasir (Bintan)

Pembangunan industri besar-besaran di kawasan Pulau Batam di satu sisi telah membuka peluang ekonomi yang cukup besar bagi kawasan sekitarnya maupun bagi para pekerja dari luar daerah. Namun, tidak dipungkiri pembukaan lahan besar-besaran untuk lokasi kegiatan industri dan perdagangan telah membuat keseimbangan alam pun terancam. Salah satu masalah yang menimpa Batam adalah penyediaan air bersih. Disinyalir 5 hingga 10 tahun ke depan kota ini akan mengalami kesulitan air bersih (Sijori Pos, 15 Juni 2002). Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembukaan hutan untuk lahan industri, kurangnya pengelolaan untuk lahan penyangga, serta program penghijauan kembali yang tidak maksimal. Padahal, dalam master plan Otorita Batam sebanyak 30 persen atau 12.000 ha wilayah lahan di Batam diperuntukkan sebagai kawasan hutan.

Masalah penyediaan air bersih juga dihadapi oleh Tanjungpinang. Sumber air bersih warga kota yang berada di Sungai Pulai telah mulai terancam karena semakin banyaknya hutan-hutan yang ada di sekitarnya ditebangi. Sementara itu, begitu banyak lahan hutan yang dibuka untuk perumahan-perumahan dan pertokoan. Perencanaan pembangunan pun kadang terkesan tidak terencana. Seperti yang terjadi di daerah Batu 8 hingga Batu 9, bila hujan seringkali air meluap membanjiri jalan karena saluran air tidak berfungsi dengan baik. Tidak hanya masalah air bersih, Tanjungpinang juga menghadapi krisis listrik (lihat Bab II). Dampak terhadap lingkungan juga terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tanpa ada kesiapan dari pihak pemerintah daerah.

Selain masalah air dan energi, Bintan juga menghadapi dampak lingkungan yang lumayan parah akibat penambangan pasir untuk memenuhi permintaan Singapura (Sijori Pos, 9 Oktober, 2001). Selama beberapa tahun terakhir Bintan merupakan pemasok pasir utama ke

Singapura, terutama di wilayah pesisir yang jauh dari pusat kota seperti kawasan Teluk Bintan, Galang Batang, dan beberapa tempat di wilayah Bintan Timur.

Kampung Nelayan di Teluk Bintan

Setelah penambangan bauksit dan timah, menyusul penambangan pasir yang semakin mengoyak bumi Bintan. Pasir dari Bintan merupakan supply utama proyek reklamasi Singapura. Singapura yang memiliki luas 580 kilometer persegi pada tahun 1999 telah memperluas wilayahnya sampai 660 kilometer persegi dan akan ditambah lagi 100 kilometer persegi untuk beberapa tahun mendatang. Proyek reklamasi daratan Singapura ini telah dimulai sejak tahun 1976, yaitu untuk reklamasi bandara Changi seluas 663 ha. Kemudian pada tahun 1997 bertambah lagi 500 ha dan pada tahap akhir pada lima tahun mendatang seluas 630 ha. Proyek reklamasi Singapura ini tidak hanya memperluas wilayah pantai tetapi juga menyatukan pulau-pulau kecil di sekitarnya untuk ditimbun menjadi daratan.

Indonesia mulai mensuplai pasir ke Singapura sejak tahun 1978. selain dari Indonesia, pasir untuk proyek reklamasi Singapura ini diperoleh dari Johor, Malaysia. Diperkirakan sampai tahun 2010 kebutuhan pasir Singapura akan mencapai 1,6 milyar meter kubik (Kompas, 11 November 2000).

Pada tahun 2000-an, bekas penambangan pasir ini meninggalkan kubangan-kubangan tanah yang sebagian kedalamannya mencapai puluhan meter (Sijori Pos, 9 Oktober 2001). Di Galang Batang, Bintan Timur, terdapat sebuah kubangan yang diperkirakan kedalamannya mencapai puluhan meter. Kubangan itu sekarang tergenang air, sehingga mulai meresahkan masyarakat di sekitarnya.

Akibat lain dari penambangan pasir adalah terjadinya pendangkalan pesisir pantai dan kerusakan terumbu karang karena kapal-kapal pengangkut pasir. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama yang menggantungkan hidup sebagai nelayan adalah berkurangnya hasil tangkapan karena rusaknya habitat ikan-ikan perairan dangkal. Hal ini dialami oleh mereka yang tinggal di pesisir teluk Bintan, yang banyak menjadi lokasi penambangan Pasir.

Tubuh dan Budaya Konsumsi

Perkembangan yang dimotori oleh Kerjasama Sijori ini juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi perkembangan budaya konsumsi. Berbagai ruang konsumsi muncul melenakan para konsumen (lihat Rohana, 2003). Dari bentuk fisik dapat dijumpai munculnya pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan yang menggoda. Pusat-pusat konsumsi ini sangat beragam, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan primer saja tetapi juga kesenangan, dengan pilihan-pilihan yang beragam sesuai selera dan kemampuan.

Di atas telah disinggung mengenai perkembangan Batam dan Tanjungpinang sebagai tujuan wisata seks para wisatawan dari negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Dampak yang paling nyata dari perkembangan ini adalah munculnya kecenderungan orang untuk melihat bisnis prostitusi sebagai peluang cukup yang mapan dan relatif tidak terpengaruh oleh ketidakpastian ekonomi. Bahkan, bisnis ini justru diuntungkan dengan turunnya nilai rupiah terhadap mata uang asing, dollar Singapura, misalnya. Ketika kurs tukar rupiah menurun, justru konsumen dari Singapura mengalami peningkatan pesat.

Dalam bisnis prostitusi, arus pertukarannya dapat dikatakan berimbang. Artinya, kedua pihak, antara penjaja dan pemakai jasa, sama-sama merasa diuntungkan. Ini disebabkan oleh perbedaan kurs mata uang tadi. Akibatnya, bisnis prostitusi pun semakin menguat setiap hari. Baik yang secara legal maupun terselubung.

Kemudahan dan keuntungan yang bisa diperoleh dari bisnis ini pun berpengaruh pada pandangan mengenai tubuh. Bila sebelumnya tubuh (tubuh perempuan, pen.) dikungkung oleh serangkaian norma yang mengikat dan mengharuskannya untuk berada dalam lingkup konsep-konsep mapan seperti perkawinan, yang jauh dari arena ekonomi, maka sekarang tubuh tidak lebih dari elemen yang berdiri sendiri, yang berada di bawah kekuasaan pribadi dan bukan lagi komunal. Kesadaran tubuh individual ini juga terkait dengan melonggarkan kontrol komunitas terhadap seorang individu karena kompleksitas masyarakat kota dengan semakin banyaknya pendatang dan kekuatan ekonomi. Bila dulu orang tidak perlu bekerja di luar rumah, sekarang orang dengan bebas bekerja di luar rumah, bahkan di luar jam kerja yang dianggap lazim (kerja malam, misalnya). Kontrol yang semakin

melonggar ini membuat orang memiliki peluang untuk menentukan jalan hidup dan tubuhnya, lepas dari pengaruh keluarga atau komunitas. Ketika pengaruh ekonomi pasar semakin menguat, tubuh pun memiliki peluang untuk ditampilkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Kekuatan ekonomi telah mengalahkan kekuatan norma tradisional. Tidak jarang orang menganggap pilihan untuk terjun dalam bisnis prostitusi sebagai pilihan yang paling rasional untuk bertahan hidup dalam tekanan ekonomi yang semakin kuat (lihat Bab III).

Perubahan penilaian terhadap tubuh ini pun mempengaruhi gaya hidup sehari-hari. Fenomena seks bebas atau seks di luar perkawinan telah menjadi hal yang lazim, di Batam maupun di Tanjungpinang. Interaksi dengan budaya global yang muncul dalam kemasapan gaya hidup urban menjadi arena yang semakin mengukuhkan tubuh sebagai bagian dari proses ekonomi, yang terkait dalam proses konsumsi. Tubuh menjadi sarana untuk mengkonsumsi, sekaligus objek untuk dikonsumsi. Budaya global yang berakar pada budaya konsumsi memang menjerat orang untuk melakukan konsumsi. Orang pergi ke diskotik, untuk mengkonsumsi gaya hidup, sebagai sarana untuk mengukuhkan identitas sebagai orang modern. Sebaliknya, ketika orang tidak dapat mengkonsumsi, sementara dorongan itu sangat besar, maka ia pun bisa menyediakan dirinya sebagai objek untuk dikonsumsi, sebagai jalan untuk dapat mengkonsumsi.

Ada banyak cerita mengenai anak-anak usia sekolah (perempuan), di Tanjungpinang terutama, yang terlibat dalam hubungan dengan laki-laki dewasa dan mapan secara ekonomi. Atau perempuan-perempuan yang pada awalnya bekerja di sektor marjinal (pramuria atau prostitusi) yang memilih 'memapankan' hubungan dengan menjadi 'istri simpanan' dari laki-laki yang mapan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dan pengaruh budaya konsumsi menemukan jawabannya dari satu sisi tubuh perempuan, seks.

Barangkali fenomena ini lazim ditemui di kota-kota besar lain di Indonesia, hanya saja untuk kasus Batam dan terutama Tanjungpinang, relasi antara seks, tubuh perempuan, dan ekonomi tampil sangat jelas. Hampir sebagian besar cerita yang dikisahkan oleh beberapa menyiratkan bahwa seks dan tubuh dapat menjadi modal untuk mencari kepastian ekonomi.

Salah seorang informan, yang melakukan hubungan seks pertamanya di usia 16 tahun, mengatakan bahwa ia melakukan karena ia yakin kekasihnya akan menikahinya. Kekasihnya itu adalah seorang pegawai pemerintah yang relatif sudah mapan secara ekonomi. Informan lain, seorang janda dengan satu anak, yang menjadi 'istri simpanan' dan hanya dikunjungi 'suami'-nya sekali setiap bulan dari lelaki yang sudah menikah dan memiliki pekerjaan dan kedudukan terhormat, mengatakan bahwa ia memilih menjalani kehidupan ini karena ia mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih mapan. 'Suami'-nya itu memberinya uang setiap bulan dan mengontrakkannya rumah. Meskipun hubungan mereka 'tidak jelas,' tetapi “untuk mendapatkan uang guna membesarkan anaknya di kampung” ia rela menjalaninya. Tidak hanya itu, ternyata banyak perempuan-perempuan, baik yang terjun dalam prostitusi atau tidak, yang menjadi 'istri' orang Singapura dan Malaysia. Istilah 'istri' ini menyiratkan adanya hubungan yang mapan, meskipun sebenarnya tidak ada pernikahan dalam konteks legal. Hubungan di antara mereka lebih merupakan hubungan pertukaran yang melibatkan tubuh perempuan dan uang laki-laki, bentuk prostitusi yang lain. Hanya saja, bagi pihak perempuan lebih menguntungkan karena biasanya para 'suami' menanggung biaya hidup sehari-hari mereka. Sedangkan bagi para laki-laki, bentuk hubungan ini pun relatif lebih 'aman' (dari ancaman HIV/AIDS misalnya) karena ia hanya berhubungan dengan satu perempuan, meskipun yang kadang tidak disadari, perempuan yang dijadikan 'istri' pun ternyata ada juga yang 'main belakang,' tetapi melayani laki-laki lain, atau memiliki bronces, laki-laki 'piaraan' yang tidak hanya ditanggung secara finansial tetapi juga menjadi kekasihnya.

Pengaruh persentuhan dengan ekonomi dan budaya global memang telah banyak membawa perubahan. Boleh jadi perubahan-perubahan ini membuat kekuatan lokal menjadi melemah. Kekuatan ekonomi global menguasai hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Banyak orang tidak kuasa menentang tarikannya untuk masuk dalam pusaran proses produksi dan konsumsi, karena terkait dengan perjuangan mempertahankan hidup.

BAB VI PENUTUP

Sebagai kota-kota yang ada di perbatasan, baik Batam dan Tanjungpinang, menjadi tempat yang merangkul pertemuan antara unsur-unsur lokal setempat maupun unsur-unsur lokal dari daerah lain yang dibawa oleh para pendatang dengan unsur-unsur dari luar, baik dalam ekonomi maupun budaya. Dalam hal ini pengaruh ekonomi global yang masuk melalui kedekatan geografis dengan Singapura merupakan titik awal persentuhannya dengan dunia pasar global. Persentuhan ini menemukan bentuknya dengan direalisasikannya sebuah kerjasama yang melibatkan tiga negara bertetangga, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Kerjasama tiga negara berjuduk Sijori ini telah membawa perubahan besar di kawasan perbatasan, Kepulauan Riau, terutama kota-kota utamanya seperti Batam dan Tanjungpinang. Kedua kota ini tidak saja memperlihatkan perkembangan fisik yang cukup pesat tetapi juga perkembangan gaya hidup. Ekonomi global yang menjadi motor perkembangan ekonomi kawasan ini, yang ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan multinasional berskala besar, membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. ekonomi subsisten yang dulu menjadi pusat kehidupan sekarang beralih menuju ekonomi pasar yang digerakkan oleh permintaan dan penawaran.

Kerjasama Sijori telah menciptakan lapangan kerja yang luas dengan berdirinya industri-industri multinasional. Namun, dampak dari pengaruh ekonomi global ini juga sangat terasakan. Semakin banyaknya para pendatang dari luar daerah telah menciptakan kondisi kota yang tidak hanya plural tetapi juga rawan konflik. Persaingan memperebutkan peluang kerja yang semakin sempit juga membuat iklim yang subur bagi meningkatnya kriminalitas.

Persentuhan dengan ekonomi pasar memunculkan kecenderungan untuk 'menjual apapun' yang bisa dijual. Tidak hanya barang produksi, tetapi juga sumber alam seperti air bersih dan pasir. Akibatnya, terjadi kerusakan alam yang merugikan penduduk lokal. Seperti yang terjadi di Pulau Bintan dengan adanya penambangan pasir untuk Singapura yang tidak memperhatikan dampak lingkungan (lihat

Bab IV).

Komoditisasi juga terjadi di wilayah yang dulunya merupakan domain pribadi, yaitu tubuh. Hal ini merupakan dampak ekonomi dan budaya global dalam perilaku dan nilai-nilai. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang uang menjadi kosa kata utama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saja karena himpitan ekonomi yang semakin kuat, tetapi juga karena adanya kebutuhan untuk pendefinisian diri. Ekonomi pasar global yang membawa pengaruh budaya global yang menempatkan konsumsi sebagai pusat pendefinisian diri.

Dorongan konsumsi yang cukup besar, sebagai realisasi aktualisasi diri, membuat orang mencari berbagai celah untuk dapat memuaskan hasrat mereka. Ini erat kaitannya dengan peluang kerja dan peluang untuk mendapatkan uang guna memuskan hasrat mengkonsumsi. Meskipun pada awalnya, peluang kerja cukup luas dengan dibukanya pusat-pusat industri dan perdagangan, tetapi dengan banyaknya para pendatang, lambat-laun peluang kerja di sektor formal ini pun mulai menyempit. Namun, perkembangan sektor formal nyaris selalu diikuti dengan perkembangan sektor informal. Di tempat inilah orang mencari peluang yang sama, terutama dalam jenis pekerjaan yang menyediakan jasa. Terbukanya kontak dengan negara tetangga yang memiliki kurs mata uang yang berbeda menjadi peluang yang sangat menarik untuk dilirik. Di sinilah kemudian yang menjadi pendorong berkembangnya bisnis prostitusi sebagai salah satu sektor informal yang cukup dapat diandalkan.

Perbedaan kurs rupiah terhadap dollar yang dianggap 'bencana' bagi mereka yang bekerja di sektor formal justru menjadi 'berkah' bagi mereka yang bergelut di bisnis tubuh. Setiap akhir minggu, ratusan orang Singapura dan Malaysia membanjiri Batam dan Tanjungpinang untuk mencari kesenangan pada tubuh-tubuh perempuan Indonesia.

Dengan kata lain, perubahan besar yang terjadi di era Kerjasama Sijori telah mengubah Batam dan Tanjungpinang sebagai metropolitan di perbatasan, tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam gaya hidup masyarakatnya yang dapat dikatakan tidak lagi memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai tradisibarangkali masih ada tetapi dalam batas-batas yang sangat kaburmelainkan lebih pada kekuatan pasar.

Interaksi global dan lokal seringkali ditandai dengan

mengaburnya nilai-nilai lokal. Dalam hal ini memang harus dicermati, sejauhmana nilai-nilai lokal tersebut mengalami pengaburan, apakah dalam konteks komunal atau pribadi. Bila dalam konteks komunal, perubahan-perubahan yang terjadi sangat mungkin merupakan bagian dari dinamika kebudayaan yang senantiasa berubah mengikuti jalannya waktu. Perubahan-perubahan ini bisa jadi merupakan adaptasi dari perubahan-perubahan besar yang ada di luar lingkup komunal yang memang harus ditanggapi dengan kelangsungan hidup mereka. Sedangkan bila dalam konteks pribadi, nyaris susah untuk dihalang karena setiap orang memiliki hak untuk menentukan jalan hidup sendiri-sendiri.

Saran yang bisa diajukan adalah untuk 'membuka diri' dengan menanggapi pengaruh-pengaruh dari luar secara lebih bijaksana, tanpa memandangnya sebagai kekuatan yang merusak. Kemudian mencermati dan mengolahnya menjadi bagian yang bisa diambil manfaatnya dan mengesampingkan bagian yang dapat merusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Barbara Watson 1997 "Recreating a Vision Daratan and Kepulauan in Historical Context" dalam *Bijdragen Tot De Taal-, Land- en Volkenkunde*. 153:483-508.
- Bappedako Tanjungpinang, dan BPS Kabupaten Kepulauan Riau 2003 *Tanjungpinang dalam Angka 2002*. Tanjungpinang: Bappedako Tanjungpinang dan BPS Kabupaten Kepulauan Riau.
- Barnard, Timothy P. 1997 "Local Heroes and National Consciousness: The Politics of Historiography in Riau", *Bijdragen Tot De Taal-, Land- en Volkenkunde*. 153:509-526.
- Firat, Fuad 1995 "Consumer Culture or Culture Consumed?," dalam J.A. Costa dan G.J. Bamossy (eds.), *Marketing in Multicultural World*. New York: Sage Publications.
- Linguist, Johan 2002 *The Anxieties of Mobility: Development, Migration, and Tourism in the Indonesian Borderlands*. Stockholm: Elanders Gotab.
- Longman 1989 *Longman Dictionary of Contemporary English*. England.
- Miller, Daniel 1985 "Consumption Studies as the Transformation of Anthropology", dalam Daniel Miller (ed.), *Consumption: A Review of New Studies*. London: Routledge. 1987 *Material Culture and Mass Consumption*. Oxford: Basil Blackwell.
- Mubyarto 1993 "Pendahuluan", dalam Mubyarto (ed.), *Riau Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Aditya Media. 1997 "Riau: Progress and Poverty", *Bijdragen Tot De Taal-, Land-En Volkenkunde*. 153:542-556.

Pemda Kotif Tanjungpinang 1997 Tanjungpinang Kota Bestari. Tanjungpinang: Pemda Kotif Tanjungpinang.

Sita Rohana 2000 Orang Jawa di Tanjungpinang. Tanjungpinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2003 *Gaya Hidup dan Pembentukan Identitas: Kajian tentang Pola Konsumsi Masyarakat Tanjungpinang, Riau.* tesis Program Pascasarjana Studi Antropologi, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tan, Mely G.1979 *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia.* Jakarta: Leknas-LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.

Wijaya, Arif 1999 *Sejarah Transportasi Laut di Kepulauan Riau 1966-1997.* Tanjungpinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Riau Pos, 31 Mei 1996, "Lagoi Dikembangkan Jadi Resort Terluas di Dunia,"

Republika, 18 Juni 1996, "Hari ini Diresmikan Pak Harto: Bintan Resort, Kawasan Wisata Terpadu Terbesar di Dunia."

Kompas, 7 September 1999, "Batam Tambah Kawasan Pemukiman 4.000 ha."

Kompas, 7 September 1999, "Batam, Pulau Industri dan Kaki Lima."

Sijori Pos, 13 Januari 2000, "Lagoi Jadi Andalan PAD Kepri."

Sijori Pos, 23 Januari 2000, "Nyanyi Sunyi di Keramaian."

Sijori Pos, 10 Februari 2000, "Investor Beli Tanah Lagoi-Lobam SIN \$ 3/ m²."

Sijori Pos, 7 April 2000, "PPN, Bencana bagi Warga Batam."

Kompas, 11 November 2000, "Singapura Dibangun dari Pasir Indonesia."

Kompas, 22 Maret 2001, "Pulau Batam: "Kesturi" yang Tengah Menuai Kehancuran."

Kompas, 11 Mei 2001, "Tak Pernah Mampu Tampung Wisatawan."

Kompas, 11 Juni 2001, "Jangan Mimpi Kerja di Batam."

Sijori Pos, 9 Oktober 2001, "Kapan Kubangan Bekas Tambang Pasir Ditimbun."

Riau Pos, 22 Januari 2002, “Batam Bonded Area, Tanjungpinang Sepi.”
Sijori Pos, 15 Juni 2002, “Hutan Lindung Terus Dibabat, Batam Terancam Kesulitan Air.”

BIOGRAFI PENULIS



SITA ROHANA, lahir di Yogyakarta 4 Oktober 1973. Memperoleh gelar Sarjana Antropologi dari Fakultas Sastra-Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997 dan gelar Magister Humaniora Jurusan Antropologi pada Universitas yang sama tahun 2003. Bekerja di Balai Kajian Sejarah (BKSNT) Tanjungpinang sejak tahun 1998. Ia aktif menulis artikel di media massa lokal maupun jurnal ilmiah nasional tentang masalah sosial budaya. Selain

melakukan penelitian kebudayaan, ia juga menerjemahkan karya ilmiah dan sastra. Beberapa karya ilmiah yang pernah diterjemhakkannya telah diterbitkan oleh P2KK-UNRI yaitu *Untaian Kata Leluhur: Marginalitas, emosi dan kuasa kata-kata magi di kalangan orang Petalangan, Riau*, terbit pada tahun 2005 (diterjemahkan dari disertasi Yonhee Kang, berjudul *Words of the Ancestors, Words for Survival: Marginality, emotions, and power of magical words among the Petalangan of Riau*, Yale University, USA, 2000) dan *Pusat Kekuasaan Ganda: Masyarakat dan Alam Siak dan Sumatra Timur, 1674-1827*, terbit pada tahun 2006 (diterjemahkan dari karya Timothy P. Barnard, berjudul *Multiple Centres of authority: Society and environment in Siak and eastern Sumatra, 1674-1827*, Leiden: KITLV Press 2003).



SUARMAN, lahir di Kampar, Riau pada 1 Januari 1963. Lulus Sarjana Sastra Indonesia, dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru tahun 1990. Sejak tahun 1991, ia menjadi peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Tanjungpinang. Menaruh minat yang besar terhadap Kesenian Rakyat. Saat ini menjabat Kasubbag Tata Usaha di BKSNT Tanjungpinang.

Perpus
Jende
3

ISBN 978-979-1281-09-6